

**ANALISIS DETERMINAN DALAM KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang)

Skripsi

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai derajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun Oleh:

Diva Hasna Nailufa

NIM 31402000317

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS DETERMINAN DALAM KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang)

Disusun Oleh:

Divya Hasna Nailufa

NIM : 31402000317

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan ke hadapan

sidang panitia ujian Skripsi

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Islam Sultan Agung

Semarang, 28 Maret 2024

Pembimbing,



Dr. Chrisna Suhendi, SE., MBA., Ak. CA.

NIK. 210493034

HALAMAN PERSETUJUAN**ANALISIS DETERMINAN DALAM KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH****(Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang)****Disusun Oleh:****Diva Hasna Nailufa****NIM 31402000317**

Telah dipertahankan di depan penguji

Pada tanggal 10 Mei 2024

Susunan Dewan Penguji**Dosen Pembimbing**Dr. Chrisna Suhendi, MBA., SE., Ak. CA.

NIK. 210493034

Dosen Penguji 1Rustam Hanafi, SE., M.Sc., Akt., CA.

NIK. 2114030119

Dosen Penguji 2Dr. Hj. Luluk M. Ifada, SE., M.Si., Akt., CA., CSRS., CSRA.

NIK. 210403051

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar

Sarjana Akuntansi pada tanggal 10 Mei 2024

Ketua Program Studi S1 AkuntansiProvita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP

NIK. 211403012

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Diva Hasna Nailufa

NIM : 31402000317

Program Studi : S-1 Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Determinan Dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarisme dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam penelitian ini.

Semarang, 28 Maret 2024

Yang membuat pernyataan,



Divia Hasna Nailufa

31402000317

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya"

(Q.S. Al Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN:

- Keluarga Penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan
- Teman-teman yang selalu memberikan motivasi



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan *good governance*, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data penelitian berupa data primer yang bersumber dari jawaban atas kuesioner yang telah disebarkan kepada pegawai yang memenuhi kriteria penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*. Berdasarkan hasil teknik tersebut, didapatkan sampel sebanyak 96 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi *software* SPSS 26.0 untuk dijadikan alat analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang. Sedangkan penerapan *good governance* dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.

Kata Kunci: Aparatur Daerah, Teknologi Informasi, *Good governance*, Pengendalian Intern, Laporan Keuangan Pemerintah Daerah



ABSTRACT

This research aims to examine the influence of the quality of regional apparatus, use of information technology, implementation of good governance, and internal control systems on the quality of Semarang City regional government financial reports. This research uses a quantitative approach with research data in the form of primary data sourced from answers to questionnaires that have been distributed to employees who meet the research criteria. The population in this study were employees at the Semarang City Regional Apparatus Organization. The sampling technique used was purposive sampling. Based on the results of this technique, a sample of 96 respondents was obtained. The data analysis technique used is multiple linear regression analysis with the help of the SPSS 26.0 software application as an analysis tool. The results of the research show that the quality of regional apparatus and the use of information technology have a positive and significant influence on the quality of the financial reports of the Semarang City regional government. Meanwhile, the implementation of a good governance and internal control system does not affect the quality of the financial reports of the Semarang City regional government.

Keywords: *Regional Apparatus, Information Technology, Good governance, Internal Control, Regional Government Financial Report*



INTISARI

Organisasi sektor publik merupakan sektor ekonomi yang menyediakan berbagai layanan pemerintah kepada masyarakat. Pemerintah daerah sebagai entitas publik bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi aspek kritis dalam memastikan informasi keuangan yang andal dan dapat diandalkan. Di tengah perubahan dinamis sosial, ekonomi, dan teknologi, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pemantau, dan pemangku kepentingan lainnya. Fenomena ini memberikan tekanan lebih pada pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, komprehensif, dan dapat diandalkan sebagai alat ukur kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangan publik.

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship* sebagai dasar pengembangan konsep dalam penelitian ini. Teori *stewardship* menggambarkan suatu situasi dimana manajemen tidak terdorong oleh tujuan-tujuan individu mereka, melainkan lebih fokus pada pencapaian tujuan utama yang menguntungkan organisasi. Teori ini mengasumsikan bahwa pada dasarnya manusia memiliki kapasitas untuk bertindak dengan penuh rasa tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi, dan jujur. Dengan mengadopsi perspektif *stewardship*, pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga sumber daya publik dengan baik demi kepentingan publik yang lebih besar.

Penelitian ini mempunyai empat hipotesis. Yang pertama, kualitas aparatur daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang kedua, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Yang ketiga, penerapan *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dan yang terakhir, sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang bersumber dari jawaban atas kuesioner yang telah disebarikan kepada pegawai yang memenuhi kriteria penelitian. Teknik pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda dengan bantuan aplikasi *software* SPSS 26.0 untuk dijadikan alat analisis. Penelitian ini menggunakan uji statistik deskriptif, uji instrumen, uji asumsi klasik, uji model, dan uji hipotesis.

Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang. Sedangkan penerapan *good governance* dan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Semarang.

KATA PENGANTAR

Tiada kata indah yang patut diucapkan seorang hamba kepada Sang Pencipta atas segala cinta kasih-Nya yang tak terhingga dan nikmat-Nya yang tak berujung sehingga kita mampu melewati hari-hari yang penuh makna, dan memberi kesempatan pada saya untuk menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Determinan Dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang)”.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan untuk mencapai derajat Program Strata (S-1) dan memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak) Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung. Penyusunan skripsi dapat terlaksana baik atas bantuan, bimbingan, serta kerja sama dari berbagai pihak yang terkait. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang baik ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

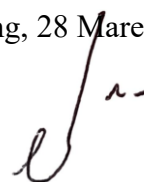
1. Kedua orang tua dan keluarga yang telah memberikan doa, dukungan, dan materiil yang senantiasa mengantarkan penulis hingga menyelesaikan skripsi ini.
2. Prof. Dr. Heru Sulisty, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.
3. Provita Wijayanti, S.E., M.Si., Ak., CA., AWP., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung.

4. Dr. Chrisna Suhendi, MBA., SE., Ak. CA., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan serta saran dalam proses penyusunan skripsi ini.
5. Rustam Hanafi, SE., M.Sc., Akt., CA. dan Dr Hj Luluk M. Ifada, SE., M.Si., Akt., CA., CSRS., CSRA., selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan dan kritik yang membangun.
6. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan motivasi kepada penulis sehingga dapat digunakan dalam penyusunan skripsi ini dan bekal hidup di masa depan.
7. Segenap Staf Jurusan dan Pegawai Akademik di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan pelayanan yang baik selama penulis melakukan studi dan penyelesaian skripsi ini.
8. Seluruh pegawai OPD Pemerintah Kota Semarang khususnya Unit Keuangan yang telah bersedia mengisi kuesioner sebagai instrumen penelitian skripsi peneliti
9. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dan menyemangati menyusun skripsi ini.
10. Lee Haechan dan seluruh member NCT yang kehadiran dan juga karyanya memberikan semangat dan motivasi bagi penulis untuk selalu bekerja keras dan berusaha semaksimal mungkin untuk menyelesaikan skripsi ini melalui karya-karyanya.

11. Dan yang terakhir, kepada diri sendiri. Diva Hasna Nailufa. Terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri sampai di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah mencoba.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan karunia-Nya dan membalas segala kebaikan mereka yang telah membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dengan sebaik-baiknya. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik dalam penyusunan maupun penyajian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang dapat membangun sehingga akan menjadi bahan pertimbangan dan masukan untuk penyempurnaan skripsi. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan penulis.

Semarang, 28 Maret 2024



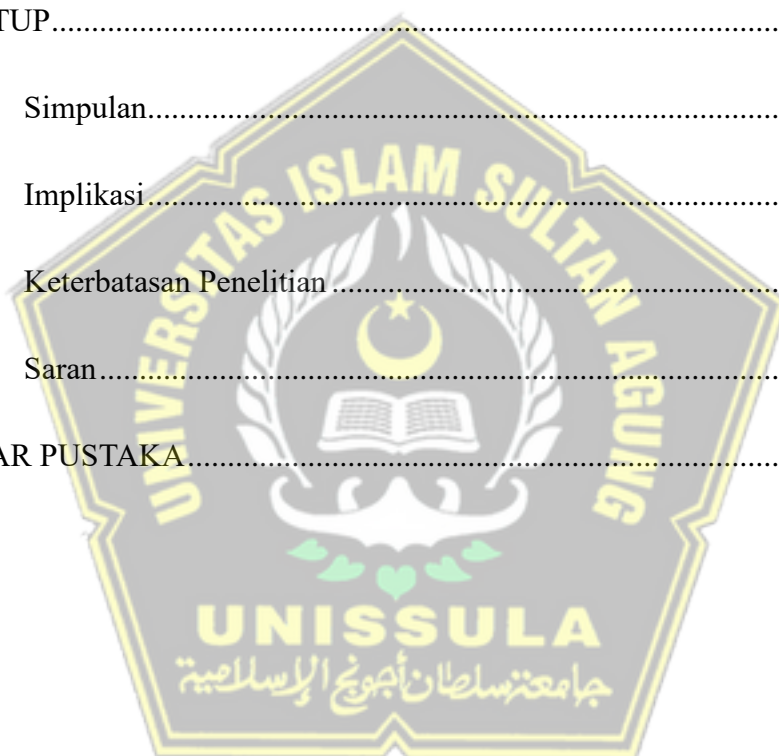
Divas Hasna Nailufa

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
INTISARI.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8

1.3	Pertanyaan Penelitian	8
1.4	Tujuan Penelitian.....	9
1.5	Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....		11
KAJIAN TEORI		11
2.1	Tinjauan Teori.....	11
2.2	Penelitian Terdahulu.....	18
2.3	Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis.....	22
2.4	Kerangka Penelitian	28
BAB III		29
METODE PENELITIAN.....		29
3.1	Jenis Penelitian.....	29
3.2	Populasi dan Sampel	29
3.3	Objek Penelitian	30
3.4	Jenis dan Sumber Data	30
3.5	Teknik Pengumpulan Data	30
3.6	Definisi Operasional.....	31
3.7	Teknik Analisis Data	38
BAB IV		44
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		44

4.1	Gambaran Umum Objek Penelitian/ Responden	44
4.2	Deskripsi Variabel	48
4.3	Analisis Data	74
4.4	Pembahasan Hasil Penelitian	90
BAB V.....		98
PENUTUP.....		98
5.1	Simpulan.....	98
5.2	Implikasi.....	98
5.3	Keterbatasan Penelitian	99
5.4	Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....		104



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2012 - 2022	3
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	18
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Dependen (Y).....	36
Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Independen (X)	36
Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Korelasi	43
Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner.....	44
Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden	46
Tabel 4.3 Penilaian Analisis Deskriptif.....	48
Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Kualitas LKPD	49
Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Kualitas Aparatur Daerah	54
Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi.....	58
Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Penerapan <i>Good governance</i>	62
Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Intern	68
Tabel 4.9 Uji Validitas Data	78
Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Data.....	80

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Penelitian	28
Gambar 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	74
Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas	81
Gambar 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas.....	82
Gambar 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi	83
Gambar 4.5 Hasil Uji Statistik F.....	84
Gambar 4.6 Hasil Uji T.....	85
Gambar 4.7 Hasil Regresi Linear.....	88



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	110
Lampiran 2 Tabulasi Jawaban Responden Variabel Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	118
Lampiran 3 Tabulasi Responden Variabel Kualitas Aparatur Daerah (X ₁).....	121
Lampiran 4 Tabulasi Jawaban Responden Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₂)	124
Lampiran 5 Tabulasi Jawaban Responden Variabel Penerapan <i>Good governance</i> (X ₃).....	127
Lampiran 6 Tabulasi Jawaban Responden Variabel Sistem Pengendalian Intern (X ₄).....	130
Lampiran 7 Data Variabel Independen dan Dependen.....	133
Lampiran 8 Surat Ijin Penelitian	136
Lampiran 9 Daftar OPD Pemerintah Kota Semarang	175
Lampiran 10 Dokumentasi.....	176

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Organisasi dalam sektor publik merupakan komponen vital dalam struktur ekonomi yang menyediakan layanan-layanan pemerintahan yang diperlukan oleh masyarakat. Peran lembaga-lembaga pemerintah ini sangat penting karena bertanggung jawab dalam mencapai tujuan-tujuan negara. Lembaga-lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengelola kepemimpinan dan koordinasi dalam pemerintahan baik di tingkat nasional maupun lokal, serta berperan dalam pembangunan masyarakat melalui berbagai inisiatif yang mereka jalankan (Pravasanti & Ningsih, 2019).

Pemerintah daerah sebagai entitas publik bertanggung jawab untuk mengelola sumber daya keuangan secara transparan dan akuntabel guna mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi aspek kritis dalam memastikan informasi keuangan yang andal dan dapat diandalkan. Dengan begitu dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi para pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal.

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menjadi isu yang semakin relevan dan mendesak dalam konteks fenomena yang terjadi saat ini. Di tengah perubahan dinamis sosial, ekonomi, dan teknologi, tuntutan akan transparansi dan akuntabilitas semakin meningkat dari berbagai pihak, termasuk masyarakat, lembaga pemantau, dan pemangku kepentingan lainnya. Fenomena ini

memberikan tekanan lebih pada pemerintah daerah untuk menyajikan laporan keuangan yang lebih akurat, komprehensif, dan dapat diandalkan sebagai alat ukur kinerja dan efisiensi pengelolaan keuangan publik.

Dalam kondisi yang penuh tantangan ini, kualitas laporan keuangan menjadi cerminan dari kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya publik dengan baik dan menjalankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu menggambarkan dengan jelas posisi keuangan, kinerja, dan hasil dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan diharapkan dapat memberikan nilai yang signifikan bagi pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengevaluasi laporan keuangan pemerintah daerah dan memberikan opini atas laporan tersebut. Salah satu opini yang bisa diberikan adalah Wajar Tanpa Pengecualian, yang menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut dianggap memadai. Salah satu aspek yang dinilai dalam penilaian ini adalah sejauh mana laporan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian internal. BPK memberikan berbagai jenis opini seperti Wajar Tanpa Pengecualian, Wajar dengan Pengecualian, Tidak Wajar, dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat. Opini-opini ini mencerminkan tingkat kualitas laporan keuangan, yang diukur berdasarkan kebebasannya dari kesalahan material, kepatuhannya terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), efektivitas sistem pengendalian internal, serta kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Yulita, 2021)

Fenomena dalam penelitian ini didasari oleh informasi dari Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK pada Organisasi Perangkat Daerah di Kota Semarang. Kota Semarang merupakan salah satu dari banyak Kota dan Kabupaten di Indonesia yang secara konsisten mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama tujuh tahun berturut-turut. Tabel 1.1 berikut ini menyajikan opini yang diperoleh Kota Semarang dari tahun 2012 sampai dengan 2022.

Tabel 1.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Semarang Kota Semarang Tahun 2012 - 2022

No	Tahun	Laporan Hasil Pemeriksaan dari BPK
1	2012	Wajar Tanpa Pengecualian
2	2013	Wajar Dengan Pengecualian
3	2014	Wajar Dengan Pengecualian
4	2015	Wajar Dengan Pengecualian
5	2016	Wajar Tanpa Pengecualian
6	2017	Wajar Tanpa Pengecualian
7	2018	Wajar Tanpa Pengecualian
8	2019	Wajar Tanpa Pengecualian
9	2020	Wajar Tanpa Pengecualian
10	2021	Wajar Tanpa Pengecualian
11	2022	Wajar Tanpa Pengecualian

Sumber: BPK RI, LHP LKPD Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2023

Dari Tabel 1.1 terlihat bahwa Kota Semarang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama tiga tahun berturut-turut, yakni dari tahun 2013 hingga 2015. Setelah itu, mulai tahun 2016 hingga 2022, Kota Semarang

berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Akan tetapi analisis yang dilakukan oleh BPK menyatakan bahwa SiLPA 2022 Pemerintah Kota Semarang mencapai Rp 318,93 Miliar. Penyebabnya adalah beberapa kegiatan yang tidak terealisasi karena terbatasnya waktu yang mendesak dan pajak pada 2022 melebihi target yang ditetapkan. SiLPA sendiri mencerminkan selisih positif antara penerimaan dan belanja pemerintah dalam suatu periode. Semakin tinggi SiLPA akan mencerminkan kurangnya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang yang berpotensi memengaruhi kualitas laporan keuangan. (BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, 2023)

Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dipengaruhi oleh kemampuan dan kompetensi pegawai aparatur daerah. Aparatur daerah yang memiliki kemampuan baik akan mampu menyusun laporan keuangan dengan akurat, mengelola aset publik secara efisien, dan menjalankan fungsi pengawasan serta pemantauan dengan efektif. Penelitian yang dilakukan Hidayat *et al.* (2021) menunjukkan bahwa kualitas aparatur daerah berhubungan positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam pengelolaan keuangan, penting untuk didukung oleh individu yang memiliki kemampuan dan kompetensi dalam ilmu keuangan. Oleh karena itu, semakin tinggi kualitas aparatur daerah, semakin baik pula kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Namun demikian, penelitian yang dilakukan Sari (2022) di Kabupaten Batang menunjukkan hasil yang kontras, yakni absennya korelasi yang signifikan antara kompetensi pegawai pemerintah daerah dengan kualitas

laporan keuangan. Penemuan ini dapat diatribusikan pada evaluasi yang hanya mempertimbangkan tingkat pendidikan dari staf di bagian akuntansi dan keuangan, tanpa memperhitungkan relevansi latar belakang pendidikan mereka. Akibatnya, proses penyusunan laporan keuangan terhambat pemahaman yang mendalam dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip serta metodologi dalam ilmu akuntansi (Hahury, 2020).

Selain kualitas dari aparatur daerah itu sendiri, pemanfaatan teknologi informasi juga memiliki dampak penting dalam penyusunan laporan keuangan yang tepat waktu. Teknologi informasi dapat membantu mengotomatisasi proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan, sehingga mengurangi risiko kesalahan manusia dan meningkatkan efisiensi operasional. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang efektif, diharapkan laporan keuangan pemerintah daerah dapat disusun lebih cepat, lebih presisi, dan lebih mudah diakses oleh pemangku kepentingan.. Ayuningtyas *et al.* (2022) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap keakuratan informasi dalam laporan keuangan. Penemuan ini didukung oleh Ardianto & Eforis (2019) yang juga menemukan bahwa teknologi informasi memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Namun, hasil riset Sintia *et al.* (2022) menunjukkan hal yang berbeda dengan menemukan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak memiliki dampak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Oki, mungkin karena pemanfaatan teknologi yang kurang optimal oleh pemerintah daerah setempat.

Salah satu faktor lain yang dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan adalah tata kelola yang baik (*good governance*). Menurut Peraturan Pemerintah No. 101 Pasal 2d, *good governance* didefinisikan sebagai pemerintahan yang menerapkan dan mengembangkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, demokrasi, kualitas layanan, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat. Dengan menerapkan tata kelola yang baik, pemerintah daerah dapat menghindari praktik-praktik yang tidak etis, mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang, dan memastikan proses pengambilan keputusan yang berintegritas dalam penyusunan laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan AgustiningTyas *et al.* (2020) menyimpulkan bahwa *good governance* memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Namun, penelitian Sari (2022) ditemukan bahwa *good governance* tidak mempengaruhi secara signifikan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Temuan ini dapat dijelaskan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya transparansi dalam penyediaan informasi keuangan dan non-keuangan, penggunaan sumber daya yang tidak optimal untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan publik, tingkat partisipasi masyarakat yang rendah dalam proses kebijakan dan layanan publik, serta kurangnya perhatian terhadap elemen-elemen internal dan eksternal yang dapat memperbaiki tata kelola yang baik (Aryani, 2021).

Sistem pengendalian internal juga merupakan faktor krusial yang dapat mempengaruhi mutu laporan keuangan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki relevansi langsung dalam penyusunan laporan keuangan. SPIP dirancang untuk memastikan ketepatan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga menghasilkan informasi keuangan yang dapat diandalkan. Penelitian yang dilakukan Fathia *et al.* (2020) menyimpulkan bahwa implementasi sistem pengendalian internal memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Namun, hasil riset Ardianto & Eforis (2019) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Berdasarkan penelitian sebelumnya dapat diketahui bahwa variabel-variabel yang diuji memiliki pengaruh dengan hasil yang tidak konsisten, maka dari itu peneliti akan melakukan penelitian kembali. Penelitian ini mengacu pada penelitian Ayuningtyas *et al.* (2022) yang berjudul Menakar Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah melalui Faktor-Faktor Penentunya (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Semarang). Variabel yang digunakan Ayuningtyas *et al.* (2022) yaitu variabel sistem pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, kualitas sumber daya manusia, penerapan good governance, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai variabel independen. Sementara variabel dependennya adalah kualitas informasi keuangan pemerintah daerah.

Peneliti menggunakan variabel baru yaitu kualitas aparatur daerah sebagai variabel independen dimana merupakan penggabungan antara variabel kualitas sumber daya manusia dan kapasitas sumber daya manusia sesuai dengan variabel yang digunakan oleh penelitian Intan Ayuningtyas, dkk (2022). Penggunaan variabel kualitas aparatur daerah sebagai variabel baru adalah untuk memfokuskan pada peran dan tanggung jawab pegawai pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, serta mengakui bahwa pegawainya memiliki kapasitas, pengetahuan, dan kompetensi yang diperlukan untuk memenuhi tugas mereka dengan baik. Ini dapat membantu dalam memahami bahwa kualitas pelayanan publik sangat tergantung pada kualitas individu-individu yang bekerja dalam pemerintahan daerah.

Berdasarkan latar belakang dan beberapa penelitian yang dilakukan sebelumnya, peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut dari masalah yang telah dikemukakan tersebut dan peneliti mencoba menuangkannya dalam sebuah melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Determinan Dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang)”.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana cara meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kualitas aparatur daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah penerapan *good governance* berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah sistem pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan yang telah diuraikan di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui pengaruh kualitas aparatur daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
2. Menganalisis dan mengetahui pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
3. Menganalisis dan mengetahui pengaruh penerapan *good governance* terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah
4. Menganalisis dan mengetahui pengaruh sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

1.5 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Dapat digunakan sebagai penerapan dan pengembangan ilmu yang telah didapatkan selama jenjang perkuliahan dan berguna sebagai motivasi serta acuan untuk mengkaji dan meneliti ulang terkait faktor-faktor penentu kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu sebagian persyaratan mencapai derajat sarjana dan menambah ilmu pengetahuan dalam menerapkan teori-teori keilmuan yang diperoleh pada saat perkuliahan.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dilakukan sebagai saran informasi dan menambah pengetahuan terkait akuntansi, khususnya mengenai determinasi dalam kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

c. Bagi Pemerintah Daerah

Penelitian ini dilakukan merumuskan strategi untuk meningkatkan praktik pengelolaan keuangan pemerintah, mengoptimalkan manfaatnya, dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik.

d. Bagi Penulis Selanjutnya

Penelitian ini dilakukan sebagai acuan bagi mereka yang berencana untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Tinjauan Teori

2.1.1 *Stewardship Theory*

Teori *Stewardship* yang diperkenalkan oleh Donaldson dan Davis pada tahun 1991 menjelaskan keadaan di mana manajemen tidak didorong oleh motif pribadi, tetapi lebih menitikberatkan pada mencapai tujuan inti yang menguntungkan entitas organisasi. Teori ini menganggap bahwa ada hubungan erat antara kepuasan dan kinerja suatu organisasi. Keberhasilan organisasi tercermin dalam usaha untuk secara optimal meningkatkan kesejahteraan kelompok, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan kepentingan individu yang terlibat dalam struktur organisasi tersebut (Fauziah, 2019).

Teori *Stewardship* mengasumsikan bahwa manusia secara inheren memiliki kapasitas untuk bertindak dengan tanggung jawab, kepercayaan, integritas, dan kejujuran. Teori ini melihat manajemen sebagai entitas yang mampu secara efektif memenuhi kebutuhan berbagai pihak yang terlibat. Dasar dari konsep ini adalah keyakinan pada individu yang diberi kepercayaan, di mana manajemen dalam suatu organisasi dianggap sebagai penjaga yang baik yang menjalankan tugas-tugas yang dipercayakan oleh pihak yang berwenang dengan penuh tanggung jawab.

Dalam konteks kualitas laporan keuangan daerah, terdapat korelasi positif antara kualitas laporan keuangan dan teori *stewardship*. Sebagai pengelola, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyajikan informasi yang memberikan nilai bagi para pengguna informasi keuangan pemerintah. Para pengguna ini, yang berperan sebagai prinsipal, menggunakan informasi tersebut untuk mengevaluasi transparansi dan membuat keputusan yang beragam, termasuk keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Pemerintah memiliki tugas penting untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Oleh karena itu, dalam lingkungan pemerintah, manajemen berperan dominan sebagai *steward* yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas ini (Rachmawati & Anik, 2020).

Pemerintah daerah sebagai pemegang informasi yang luas dan penerima kepercayaan publik, berkomitmen untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas melalui penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Dengan mengadopsi perspektif *stewardship*, pemerintah daerah bertekad untuk mengelola sumber daya publik dengan baik demi kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat. Dalam konteks ini, variabel-variabel seperti kualitas aparatur, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan *good governance*, dan sistem pengendalian internal berfungsi sebagai instrumen dan mekanisme untuk mencapai tujuan *stewardship*, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah. Implikasi teori

stewardship dalam penelitian ini adalah mampu menjelaskan peran pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya, mampu menampung aspirasi masyarakat, memberikan pelayanan publik yang baik, serta menyusun laporan keuangan yang akuntabel, sehingga tujuan ekonomi tercapai dan kesejahteraan masyarakat dapat dimaksimalkan (Indriyani & Widiastuti, 2020).

2.1.2 Kualitas Aparatur Daerah

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas memerlukan staf pemerintah daerah yang memiliki pemahaman yang mendalam tentang akuntansi pemerintahan. Aparatur daerah, menurut Triwardana (2017), adalah individu yang diperkerjakan dalam suatu organisasi untuk berperan sebagai penggerak, pemikir, dan perencana dalam mencapai tujuan organisasi. Dalam konteks ini, sumber daya manusia menjadi faktor kunci yang menentukan keberhasilan organisasi dalam menjalankan tugasnya secara efektif (Pravasanti & Ningsih, 2019).

Penilaian kualitas aparatur pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan menilai kinerja mereka dapat dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut meliputi latar belakang pendidikan, terutama apakah mereka memiliki pendidikan di bidang akuntansi, apakah mereka telah mengikuti pelatihan terkait akuntansi berbasis akrual, serta penerapan konsep akrual dalam pekerjaan mereka, seperti dalam penyusunan laporan keuangan berbasis akrual. Faktor lain yang perlu dipertimbangkan adalah tingkat

kompetensi mereka dan sejauh mana mereka memiliki tanggung jawab dalam organisasi, yang sering kali terkait dengan tingkat jabatan mereka. Semakin tinggi jabatan seseorang, semakin besar tanggung jawab mereka terhadap hasil laporan keuangan pemerintah yang harus memiliki kualitas tinggi.

2.1.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Jurnal dan Supomo (2002) dalam Efendi (2017), pemanfaatan teknologi informasi merupakan upaya optimalisasi penggunaan teknologi ini untuk meningkatkan integrasi dan fungsi teknologi tersebut sebagai pedoman dalam melaksanakan serta menyelesaikan tugas-tugas pemerintah daerah. Teknologi informasi berperan tidak hanya sebagai perangkat komputer (baik perangkat keras maupun perangkat lunak) untuk memproses dan menyimpan data, tetapi juga sebagai teknologi komunikasi yang digunakan untuk mentransmisikan dan menyebarkan informasi (Apriansyah et al., 2020; Sari, 2022).

Kemajuan teknologi informasi di era sekarang telah memiliki kemampuan untuk meningkatkan kecepatan proses penyusunan laporan keuangan. Hal ini menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan, terpercaya, dan tepat waktu. Pemanfaatan teknologi informasi memungkinkan percepatan proses pelaporan keuangan jika dibandingkan dengan metode manual. Dalam konteks laporan keuangan pemerintah daerah, teknologi diperlukan untuk menyusun laporan

keuangan dengan cepat, mengolah transaksi, menyusun laporan keuangan dengan akurat, mengelola data besar, serta mempublikasikan informasi melalui jaringan yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

2.1.4 Penerapan *Good governance*

Bank Dunia mendefinisikan *good governance* sebagai tanggung jawab pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang baik. Konsep ini meliputi pembangunan yang bertanggung jawab, penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas dalam proses demokratisasi, serta upaya menghindari kesalahan dalam alokasi dana dan investasi. Tujuan utamanya adalah mencegah korupsi di sektor politik dan administrasi pemerintahan, serta membangun disiplin di semua tingkatan pemerintahan melalui berbagai program dan kegiatan yang mendukung masyarakat dan pengelolaan pemerintahan. (Sari, 2022).

Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah, langkah yang diambil adalah meningkatkan tingkat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Dengan menerapkan praktik tata kelola yang baik dan memastikan pencegahan terhadap Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), diharapkan kualitas pelayanan publik serta laporan keuangan daerah dapat ditingkatkan. Tindakan ini merupakan implementasi konkret dari prinsip-prinsip *good governance* yang berdampak positif terhadap mutu laporan keuangan daerah.

2.1.5 Sistem Pengendalian Intern

Definisi pengelolaan intern menurut *Committee of Sponsoring Organization treadway Commission* (COSO, 2013) adalah “Pengelolaan intern yang dimaksud adalah suatu metode yang dipengaruhi oleh dewan direksi, manajemen, dan karyawan yang dipersiapkan untuk menyampaikan jaminan yang meyakinkan bahwa misi organisasi akan dicapai, ketawaan terhadap Undang-Undang yang berlaku”. Terdapat beberapa indikator yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, yaitu 1) daerah pengelolaan, 2) evaluasi efek, 3) jaringan dan komunikasi, 4) laporan teknologi informasi, dan 5) personalia teknologi informasi. Penerapan pengendalian internal dalam kaitannya dengan kualitas laporan keuangan melibatkan proses pengaturan, kebijakan, dan praktik yang dirancang dan dilaksanakan oleh suatu entitas untuk memastikan keandalan, akurasi, dan integritas laporan keuangannya. (Purba & Purba, 2023)

Penerapan pengendalian internal yang efektif secara langsung berdampak pada kualitas laporan keuangan. Pengendalian internal yang baik membantu mengurangi risiko kesalahan atau kecurangan dalam penyusunan laporan keuangan. Ini meliputi langkah-langkah seperti pemisahan tugas yang memadai, verifikasi independen, kebijakan dan prosedur yang terdokumentasi dengan baik, serta pemantauan yang efektif terhadap proses pelaporan keuangan.

Dengan penerapan sistem pengendalian internal yang kuat, entitas dapat memastikan bahwa laporan keuangannya mencerminkan informasi

yang akurat, dapat diandalkan, dan relevan bagi pengguna laporan. Ini memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan, termasuk investor, kreditor, dan pihak berkepentingan lainnya, bahwa laporan keuangan telah disiapkan dengan standar yang tinggi dan memberikan gambaran yang jelas tentang kinerja keuangan entitas.

Penerapan sistem pengendalian internal juga membantu mengidentifikasi dan mengatasi kelemahan atau kekurangan dalam proses pelaporan keuangan. Dengan memperbaiki dan memperkuat pengendalian internal yang relevan, entitas dapat meningkatkan kualitas laporan keuangannya seiring waktu, meminimalkan risiko kesalahan, dan meningkatkan tingkat kepercayaan dari pemangku kepentingan.

2.1.6 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pernyataan dari Mulyana (2010: 96) dan Baridwan (2000: 17) menggarisbawahi pentingnya kualitas dalam konteks Laporan Keuangan Daerah. Laporan keuangan ini dianggap sebagai ringkasan transaksi keuangan selama periode tertentu dan memiliki signifikansi yang besar bagi pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi mengenai keuangan, pencapaian anggaran, dan kinerja keuangan, yang nantinya akan membantu dalam perumusan kebijakan dan evaluasi pengelolaan sumber daya keuangan di tingkat daerah (Pravasanti & Ningsih, 2019).

Kualitas laporan keuangan dalam kerangka Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)

melibatkan serangkaian kriteria normatif yang harus dipenuhi dalam penyajian informasi akuntansi untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Terdapat empat karakteristik inti yang harus terpenuhi agar laporan keuangan pemerintah daerah mencapai standar kualitas yang diharapkan. Ini mencakup aspek relevansi, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan keterpahaman.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian sebelumnya telah dilakukan dan dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
1	(Ayuningtyas et al., 2022)	Menakar Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Faktor-Faktor Penentunya (Studi Empiris Pada SKPD di Kota Semarang)	Independen = Sistem Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kualitas Sumber Daya Manusia, Penerapan <i>Good governance</i> , dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Dependen = Kualitas Informasi Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi informasi dan kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan • Sistem pengendalian intern, penerapan <i>good governance</i> dan kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan

No	Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
2	(Pravasanti & Ningsih, 2019)	Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo)	Independen = Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dependen = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Kualitas aparatur daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah • Sistem akuntansi keuangan daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah • Pemanfaatan teknologi informasi secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah
3	(Sari, 2022)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, <i>Good governance</i> dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada	Independen = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, <i>Good governance</i> , dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Dependen = Kualitas Laporan Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penerapan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah • Kualitas aparatur pemerintah daerah dan <i>good governance</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

No	Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
		Kabupaten Batang)		
4	(Saputra, 2021)	Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau	Independen = Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Dependen = Kualitas Laporan Keuangan Intervening = Sistem Pengendalian Intern	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan • Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan • Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan • Sistem pengendalian intern memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan • Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap sistem pengendalian intern • Pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh tidak signifikan terhadap sistem pengendalian intern • Kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh

No	Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
				<p>yang signifikan terhadap sistem pengendalian intern</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sistem pengendalian intern mampu berperan dalam mengantarai/ memediasi hubungan antara variabel pemanfaatan teknologi informasi dengan variabel kualitas laporan keuangan • Sistem Pengendalian intern tidak mampu berperan dalam mengantarai/ memediasi hubungan antara variabel pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah dengan variabel kualitas laporan keuangan
5	(Purba & Purba, 2023)	Determinasi Dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Independen = Pengetahuan Akuntansi, Sistem Manajemen Internal Pemerintah, Penggunaan Teknologi Informasi, dan Fungsi Audit Internal Dependen = Kualitas Keuangan Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan akuntansi, sistem pengelolaan intern pemerintah, penerapan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan pada mutu informasi finansial aparat daerah di Kabupaten Deli Serdang • Fungsi internal audit tidak berpengaruh negatif pada mutu informasi finansial aparat daerah di

No	Penulis (Tahun)	Judul	Variabel	Hasil
				Kabupaten Deli Serdang

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kualitas aparatur daerah sangat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Kompetensi teknis yang dimiliki oleh pegawai yang kompeten memungkinkan mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip akuntansi dan prosedur pelaporan keuangan. Hal ini memungkinkan mereka untuk menyusun laporan keuangan dengan tepat dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam teori *stewardship* menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya publik yang efisien dan efektif. Kualitas aparatur daerah yang mencakup kompetensi, integritas, dan kinerja pegawai pemerintah adalah faktor penting dalam menjalankan peran *stewardship*. Aparatur yang berkualitas diharapkan dapat mengelola sumber daya publik dengan baik, menghindari penyalahgunaan, dan menyajikan laporan keuangan yang akurat.

Menurut penelitian Ayuningtyas *et al.* (2022) kualitas sumber daya manusia memiliki dampak signifikan terhadap kualitas informasi yang terdapat dalam laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam bidang akuntansi pemerintahan, manajemen keuangan pemerintah, dan

organisasi pemerintahan, penting untuk memiliki tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten. Mereka harus memiliki pengalaman dan pemahaman yang mendalam tentang manajemen keuangan daerah sebagai prasyarat esensial untuk menghasilkan informasi yang akurat, unggul, dan profesional. Temuan ini menegaskan bahwa kualitas aparatur daerah berperan dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah.

Berdasarkan paparan sebelumnya hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut.

H_1 = Kualitas aparatur daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Teknologi informasi meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pencatatan, perhitungan, dan pelaporan transaksi keuangan dengan memungkinkan penggunaan perangkat lunak akuntansi dan sistem teknologi informasi yang canggih. Hasilnya adalah laporan keuangan dapat disiapkan lebih cepat dan dengan tingkat akurasi yang lebih tinggi, mengurangi potensi kesalahan manusia dalam penyusunan laporan tersebut.

Dalam konteks *stewardship*, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan sumber daya publik merupakan langkah untuk

meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Dengan penerapan yang cermat, teknologi informasi memungkinkan pemerintah daerah untuk melakukan pemantauan dan pengelolaan sumber daya dengan lebih optimal. Hal demikian secara keseluruhan dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Menurut hasil penelitian Sari (2022), pemanfaatan teknologi informasi berdampak positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah di Kabupaten Batang. Di wilayah tersebut, teknologi informasi telah diterapkan secara efektif untuk memfasilitasi proses kerja dan penyusunan laporan keuangan. Ketersediaan infrastruktur teknologi informasi yang komprehensif memungkinkan seluruh unit Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Batang menggunakan aplikasi keuangan yang sesuai dengan perkembangan teknologi, dan digunakan secara optimal untuk mengolah data transaksi keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penemuan ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat adopsi teknologi informasi, semakin meningkat pula kualitas laporan keuangan daerah secara signifikan.

Berdasarkan paparan diatas, hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut.

H_2 = Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.3 Pengaruh Penerapan *Good governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan *good governance* dalam pemerintah daerah memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. *Good governance* mendorong transparansi dalam tindakan pemerintah, memaksa mereka untuk menjadi lebih terbuka mengenai kebijakan keuangan dan tindakan yang mereka ambil. Transparansi ini menciptakan tekanan positif untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih lengkap dan akurat. Selain itu, *good governance* juga berfokus pada kepatuhan terhadap aturan dan regulasi, sehingga pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip ini cenderung lebih mematuhi standar akuntansi dan pelaporan keuangan yang berlaku. Dampak dari pendekatan ini secara positif terlihat dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan, meminimalkan risiko kesalahan atau ketidakakuratan dalam laporan.

Stewardship dalam lingkup pemerintahan melibatkan aspek-aspek *good governance* seperti transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Implementasi *good governance* dalam pengelolaan sumber daya publik berdampak pada peningkatan kepercayaan masyarakat dan pihak-pihak yang memiliki kepentingan eksternal. Hasilnya, laporan keuangan yang dipersiapkan dengan mematuhi prinsip-prinsip *good governance* umumnya lebih dapat dipercaya dan relevan.

Menurut studi yang dilakukan oleh AgustiningTyas *et al.* (2020), ditemukan bahwa *good governance* berdampak positif secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Organisasi

Perangkat Daerah (OPD) Kota Malang. Temuan tersebut menunjukkan bahwa OPD tersebut berhasil menerapkan *good governance* secara efektif dalam proses pemerintahannya sesuai dengan perannya. Kualitas laporan keuangan yang baik dianggap sebagai syarat penting untuk mencapai standar *good governance*, yang mengindikasikan bahwa implementasi *good governance* dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan di tingkat daerah secara positif.

Berdasarkan paparan diatas, hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut.

H₃ = Penerapan *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.3.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Penerapan sistem pengendalian intern memiliki peranan krusial dalam meningkatkan mutu laporan keuangan entitas pemerintah. Sistem ini berperan dalam memastikan keakuratan dan kepatuhan dengan memastikan bahwa semua transaksi keuangan tercatat dengan tepat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Ini mengurangi risiko kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan dan memperkuat ketaatan terhadap peraturan-peraturan yang ada.

Sistem pengendalian intern yang efektif juga berfungsi sebagai garda terdepan dalam pencegahan dan deteksi tindakan penipuan atau praktik-praktik curang dalam pencatatan dan pelaporan keuangan serta menjaga integritas laporan dengan menghindari penyajian data yang tidak akurat. Ketepatan dan konsistensi dalam proses pencatatan dan

pelaporan juga ditingkatkan melalui sistem ini. Hasilnya dapat berupa laporan keuangan yang lebih akurat dan dapat dipercaya.

Dalam teori *stewardship*, terdapat kewajiban untuk memelihara integritas dan kualitas laporan keuangan. Penggunaan sistem pengendalian intern merupakan strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Dalam konteks *stewardship*, sistem pengendalian intern yang kuat memastikan manajemen yang efektif atas sumber daya publik, mematuhi kebijakan yang telah ditetapkan, dan mengurangi risiko pelanggaran atau kesalahan.

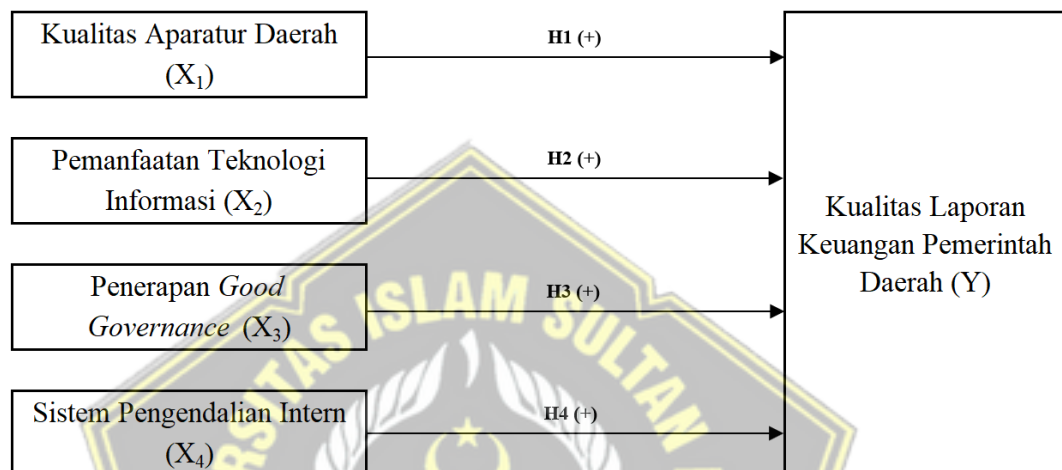
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Sinulingga *et al.* (2022) disebutkan bahwa implementasi sistem pengendalian intern memiliki dampak positif yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Dinas Kesehatan Kabupaten Karo. Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan pengendalian intern dalam operasional administratif dapat efektif meningkatkan standar kualitas laporan keuangan di tingkat daerah, yang mencerminkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam konteks keuangan pemerintahan.

Berdasarkan paparan diatas, hipotesis yang dapat diajukan sebagai berikut.

H_4 = Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

2.4 Kerangka Penelitian

Berdasarkan kerangka pemikiran teoritis dan pengembangan hipotesis yang telah dijelaskan sebelumnya, kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Penelitian

Keterangan:

→ : Pengaruh variabel X ke variabel Z

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian asosiatif yang bertujuan untuk mengidentifikasi hubungan antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini menggunakan hubungan kausal, yaitu menguji pengaruh langsung antara kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan *good governance*, dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam konteks penelitian ini terdiri dari pegawai yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, yang dipilih sebagai fokus studi untuk mengambil kesimpulan terkait dengan kualitas dan karakteristik yang spesifik yang dimiliki oleh objek atau subjek tersebut. (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

Dalam penelitian ini, sampel dipilih menggunakan metode *purposive sampling* yang berarti sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Pemilihan sampel dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa Organisasi Perangkat Daerah yang mengonsolidasikan laporan keuangan OPD Kota Semarang dan menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah merupakan fokus utama penelitian ini. Jumlah sampel maksimal adalah 3 responden di setiap OPD Kota Semarang. Pemilihan 3 responden pada setiap OPD didasarkan pada asumsi

bahwa Kepala Subbagian Keuangan/ Akuntansi atau penatausahaan keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai pelaporan keuangan di tiap OPD.

3.3 Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang, yang menjadi fokus untuk diteliti dan dianalisis. Penelitian dilakukan di Kota Semarang, dengan waktu pelaksanaan pada bulan Desember 2023. Peneliti melengkapi penelitian ini dengan mencari informasi melalui internet, media cetak, dan berbagai sumber lain yang mendukung keperluan penelitian.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui kuesioner yang didistribusikan kepada pegawai sesuai dengan kriteria penelitian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa data primer kuantitatif, yang diperoleh langsung dari sumber asli melalui instrumen kuesioner. Kuesioner tersebut disebarkan kepada pegawai terkait dengan cara mengunjungi kantor OPD yang bersangkutan. Selanjutnya juga akan dijelaskan bagaimana tata cara pengisian kuesioner secara tepat dan benar agar memudahkan responden dalam pengisian jawaban. Kemudian data diolah menjadi angka (kuantitatif) berdasarkan angka yang tertera dalam skala kuesioner.

Dalam penelitian ini, digunakan skala Likert dengan lima dimensi, yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS). Penelitian ini menghilangkan kategori jawaban netral atau ragu-ragu dengan alasan berikut (Hadi, 1991: 19): pertama, kategori *undecided* memiliki makna ganda yang dapat ditafsirkan sebagai belum mampu membuat keputusan atau memberikan tanggapan; kedua, adanya jawaban netral dapat menyebabkan kecenderungan responden untuk memilih jawaban tengah; ketiga, tujuan dari kategori jawaban SS, S, TS, dan STS adalah untuk mengevaluasi kecenderungan responden terhadap setuju atau tidak setuju.

3.6 Definisi Operasional

3.7.1 Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Variabel yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang merujuk pada informasi yang terdapat di dalamnya yang memenuhi standar kualitatif. Kualitas laporan keuangan dianggap baik jika memenuhi karakteristik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yaitu informasi yang relevan, dapat dipercaya, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Untuk mengukur variabel ini, penelitian ini mengadaptasi kuesioner yang dikembangkan berdasarkan penelitian Pratiwi & Astuti (2018) dengan menggunakan 9 pernyataan positif sebagai indikator.

1. Tiga pernyataan mengenai relevansi laporan keuangan
2. Dua pernyataan mengenai keandalan laporan keuangan

3. Dua pernyataan mengenai kemudahan dalam membandingkan laporan keuangan
4. Dua pernyataan mengenai kemudahan dalam memahami laporan keuangan

Variabel ini diukur menggunakan skala interval berdasarkan skala Likert dengan 5 opsi jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

3.7.2 Variabel Bebas (Variabel Independen)

3.2.2.1 Kualitas Aparatur Daerah

Kualitas aparatur daerah adalah kemampuan individu dalam suatu organisasi atau sistem yang merujuk pada atribut-atribut dan karakteristik yang memengaruhi kinerja dan kemampuan pegawai pemerintah daerah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kualitas aparatur daerah melibatkan tingkat kompetensi dan keahlian pegawai pemerintah daerah. Aparatur yang berkualitas memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang relevan dalam bidang tugas mereka. Mereka mampu memahami peraturan, kebijakan, dan praktik terkait, serta menerapkannya dengan baik dalam menjalankan tugas pemerintahannya. Untuk mengukur variabel ini, penelitian ini mengadaptasi kuesioner yang dikembangkan berdasarkan penelitian Soimah (2014) dengan menggunakan 11 pernyataan positif sebagai indikator.

1. Tiga pernyataan mengenai pengetahuan
2. Tiga pernyataan mengenai tanggung jawab
3. Tiga pernyataan mengenai pelatihan
4. Dua pernyataan mengenai pengalaman.

Variabel ini diukur menggunakan skala interval dengan skala Likert dengan 5 preferensi jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS).

3.2.2.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi merujuk pada penggunaan komputer dan jaringan internet untuk mengolah data guna menghasilkan informasi yang berkualitas. Tingkat pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penyusunan laporan keuangan tercermin dari seberapa optimal pegawai menggunakan fasilitas komputer dan internet untuk mengolah data keuangan menjadi laporan keuangan. Efektivitas pemanfaatan teknologi informasi dapat ditingkatkan dengan melakukan pemeliharaan rutin terhadap komputer yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi lebih efektif jika komputer yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan dirawat dan dipelihara secara teratur. Untuk mengukur variabel ini, penelitian ini mengadaptasi kuesioner yang dikembangkan

berdasarkan penelitian Soimah (2014) dengan menggunakan 7 pernyataan positif sebagai indikator.

1. Enam pernyataan mengenai pemanfaatan komputer
2. Satu pernyataan mengenai pemanfaatan internet

Variabel ini diukur menggunakan skala interval dengan skala Likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

3.2.2.3 Penerapan *Good governance*

Good governance adalah konsep tata kelola pemerintahan yang optimal dimana mengacu pada prinsip-prinsip dan praktik manajemen yang transparan, akuntabel, partisipatif, berkeadilan, dan efektif dalam mengelola sumber daya dan urusan publik. Kaitannya dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, penerapan *good governance* dapat memiliki peran krusial dalam meningkatkan integritas serta kehandalan laporan keuangan. Untuk mengukur variabel ini, penelitian ini mengadaptasi kuesioner yang dikembangkan berdasarkan penelitian Kurniasari (2018) dengan menggunakan 15 pernyataan positif sebagai indikator.

1. Dua buah pernyataan mengenai partisipasi
2. Tiga buah pernyataan mengenai kepastian hukum
3. Satu buah pernyataan mengenai transparansi

4. Satu buah pernyataan mengenai *responsiveness*
5. Dua buah pernyataan mengenai *consensus orientation*
6. Satu buah pernyataan mengenai *equity*
7. Tiga buah pernyataan mengenai efektifitas dan efisiensi
8. Satu buah pernyataan mengenai akuntabilitas
9. Satu buah pernyataan mengenai *strategic vision*

Variabel ini diukur menggunakan skala interval dengan skala Likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

3.2.2.4 Sistem Pengendalian Intern

Dalam konteks kualitas laporan keuangan, sistem pengendalian intern berfungsi sebagai faktor yang dapat memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan dan akhirnya memengaruhi kualitas laporan tersebut. Untuk mengukur variabel ini, penelitian ini mengadaptasi kuesioner yang dikembangkan berdasarkan penelitian Yulita (2021) dengan menggunakan 9 pernyataan positif sebagai indikator.

1. Empat pernyataan mengenai lingkungan pengendalian
2. Dua pernyataan mengenai penilaian risiko
3. Tiga pernyataan mengenai aktivitas pengendalian
4. Dua pernyataan mengenai informasi dan komunikasi
5. Dua pernyataan mengenai pemantauan

Variabel ini diukur menggunakan skala interval dengan skala Likert yang terdiri dari 5 pilihan jawaban yaitu Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Kurang Setuju (KS), Tidak Setuju (TS) dan Sangat Tidak Setuju (STS).

Untuk lebih jelasnya, berikut disajikan tabel yang meringkas mengenai definisi operasional.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Dependen (Y)

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Acuan
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Informasi yang tertera pada laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif.	Relevan	Interval	(Pratiwi & Astuti, 2018)
		Andal		
		Dapat dibandingkan		
		Dapat dipahami		

Tabel 3.2 Definisi Operasional Variabel Independen (X)

Variabel	Definisi	Indikator	Skala	Acuan
Kualitas Aparatur Daerah (X ₁)	Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau suatu sistem yang merujuk pada atribut-atribut dan karakteristik.	Tanggung jawab	Interval	(Soimah, 2014)
		Pengetahuan		
		Pelatihan		
		Pengalaman		

Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₂)	Pemanfaatan teknologi informasi, termasuk komputer dan jaringan internet, dalam pengolahan data dan produksi informasi yang berkualitas.	Komputer	Interval	(Soimah, 2014)
		Internet		
Penerapan <i>Good governance</i> (X ₃)	Konsep tata kelola pemerintahan yang baik, yang mengacu pada prinsip dan praktik manajemen yang transparan, akuntabel, partisipatif, adil, dan efektif dalam mengelola sumber daya serta urusan publik.	Partisipasi	Interval	(Kurniasari, 2018)
		Kepastian hukum		
		Transparansi		
		<i>Responsiveness</i>		
		<i>Consensus orientation</i>		
		<i>Equity</i>		
		Efektifitas dan efisiensi		
		Akuntabilitas		
		<i>Strategic vision</i>		
Sistem Pengendalian Intern (X ₄)	Faktor yang dapat memengaruhi proses penyusunan laporan keuangan dan akhirnya memengaruhi kualitas laporan tersebut.	Lingkungan pengendalian	Interval	(Yulita, 2021)
		Penilaian resiko		
		Aktivitas pengendalian		
		Informasi dan komunikasi		
		Pemantauan		

3.7 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan mencakup statistik deskriptif dan analisis regresi linier berganda. Data penelitian ini dianalisis menggunakan *software computer* berupa SPSS (*Statistical Package for Social Science*).

3.7.1 Statistik Dekriptif

Statistik deskriptif adalah ilmu statistika yang berkaitan dengan pengumpulan, pengorganisasian, penyajian, dan interpretasi data secara deskriptif. Tujuan utama statistik deskriptif adalah untuk merangkum dan menggambarkan karakteristik, pola, dan informasi dasar dari data yang dianalisis. Uji statistik deskriptif meliputi perhitungan nilai rata-rata (*mean*), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

3.7.2 Uji Instrumen

3.7.2.1 Uji Validitas

Suatu kuesioner dianggap valid jika pernyataannya dapat mengungkapkan apa yang hendak diukur. Penelitian ini melakukan pengujian validitas dengan menggunakan korelasi bivariat antara skor tiap indikator dengan skor total konstruk. Hasil dari korelasi bivariat ini terlihat pada *output Cronbach's Alpha* yang tercantum dalam kolom *Correlated Item – Total Correlation*. Pengujian dilakukan pada tingkat signifikansi 5% atau 0,05 dengan kriteria kevalidan yang ditentukan oleh perhitungan apakah nilai korelasi *Pearson* (R hitung) < R tabel,

menunjukkan bahwa pernyataan tersebut tidak valid; sebaliknya, jika nilai korelasi Pearson (R hitung) $>$ R tabel, maka pernyataan tersebut dianggap valid.

3.7.2.2 Uji Reliabilitas

Suatu kuesioner dianggap memiliki reliabilitas jika jawaban yang diberikan oleh responden konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan menggunakan metode one shot, yang artinya pengukuran dilakukan sekali saja dan hasilnya kemudian dibandingkan dengan pernyataan lain atau diukur korelasinya menggunakan teknik *Cronbach's Alpha*. *Cronbach's Alpha* digunakan sebagai indikator untuk mengukur hubungan korelasi antara skala yang dibuat dengan semua skala variabel yang terdapat. Suatu variabel dianggap reliabel jika nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,60.

3.7.3 Uji Asumsi Klasik

3.7.3.1 Uji Normalitas

Tujuan dari uji normalitas adalah untuk mengevaluasi apakah variabel residual dalam model regresi mengikuti distribusi normal. Uji ini merupakan langkah penting dalam proses analisis data. Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi normalitas termasuk analisis grafis dan uji statistik. Dalam konteks penelitian ini, uji statistik *non-parametrik Kolmogorov-Smirnov* (K-S) akan digunakan untuk menguji normalitas data. Jika nilai

probabilitas signifikan dari uji K-S adalah $\geq 5\%$ atau 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

3.7.3.2 Uji Multikolinearitas

Tujuan dari uji ini adalah untuk mengevaluasi apakah terdapat korelasi antara variabel independen dalam model regresi. Sebuah model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya korelasi di antara variabel independen, yang dapat diamati dengan $TOL > 0,10$ atau nilai $VIF < 10$. Ketika nilai TOL rendah, hal ini sejalan dengan nilai VIF yang tinggi (karena $VIF = 1/TOL$). Sebagai panduan umum, batas yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas adalah jika $TOL < 0,10$ atau nilai $VIF > 10$.

3.7.4 Uji Model

3.7.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) mengukur sejauh mana model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai R^2 berkisar antara nol hingga satu. R^2 yang rendah menunjukkan bahwa variabel independen memiliki keterbatasan dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Sebaliknya, nilai yang mendekati satu menandakan bahwa variabel independen mampu memberikan sebagian besar informasi yang diperlukan untuk mengestimasi variasi variabel dependen. Sebagai contoh, jika R^2 memiliki nilai

0,80, ini berarti 80% dari variasi variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

3.7.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Uji F digunakan untuk menilai apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen dalam model regresi. Uji ini juga berfungsi untuk menguji signifikansi keseluruhan dari model regresi. Hasil uji F dapat ditemukan dalam tabel ANOVA, di mana nilai signifikansi kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama antara variabel independen dan variabel dependen. Evaluasi uji F melibatkan perbandingan nilai F hitung dengan nilai F tabel; jika nilai F hitung melebihi nilai F tabel, maka hipotesis nol akan ditolak dan hipotesis alternatif diterima.

3.7.5 Uji Hipotesis

3.7.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengevaluasi seberapa besar pengaruh masing-masing variabel independen secara individual terhadap variasi variabel dependen. Pengujian ini dilakukan dengan tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha = 5\%$). Kriteria untuk menerima atau menolak hipotesis adalah sebagai berikut.

- Jika nilai signifikansi $> 0,05$, variabel independen secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel

dependen dan arah koefisien variabel tidak sesuai dengan hipotesis alternatif (H_a), sehingga H_a ditolak.

- Jika nilai signifikansi $< 0,05$, variabel independen secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel dependen dan arah koefisien variabel sesuai dengan hipotesis alternatif (H_a), sehingga H_a diterima.

3.7.5.2 Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda adalah teknik statistik yang umum digunakan untuk menguji hubungan antara satu atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Persamaan matematis regresi linier berganda dapat dinyatakan sebagai berikut (Binawati & Nindyaningsih, 2022).

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4$$

Keterangan:

Y = Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

α = Konstanta

β = Koefisien regresi

X_1 = Variabel kualitas aparatur daerah

X_2 = Variabel pemanfaatan teknologi informasi

X_3 = Variabel penerapan *good governance*

X_4 = Variabel pengendalian intern

Adapun untuk melihat hubungan atau korelasi, penulis menggunakan analisis yang dikemukakan oleh Sugiyono (2017: 184) sebagai berikut.

Tabel 3.3 Interpretasi Koefisien Korelasi

Besarnya Pengaruh	Tingkat Hubungan
0,00 - 0,199	Sangat Lemah
0,20 - 0,399	Lemah
0,40 - 0,599	Sedang
0,60 - 0,799	Kuat
0,80 - 1,000	Sangat Kuat

Sumber: (Binawati & Nindyaningsih, 2022)



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian/ Responden

Populasi dalam penelitian ini terdiri dari pegawai yang bekerja di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang. Sampel dipilih dengan mempertimbangkan bahwa Kepala Subbagian Keuangan/ Akuntansi, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran memiliki pengetahuan yang dalam tentang pelaporan keuangan di masing-masing OPD.

Pendekatan pengambilan sampel dalam penelitian ini melibatkan penyebaran kuesioner di 34 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Semarang. Proses pengumpulan data dilakukan dari tanggal 22 Desember 2023 hingga 30 Januari 2024. Rincian distribusi penyebaran kuesioner terdokumentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 4.1 Distribusi Penyebaran Kuesioner

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
1	Dinas Kesehatan	3	3
2	Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP)	3	3
3	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	3
4	Badan Pendapatan Daerah	3	3
5	Badan Pengelola Keuangan Aset Daerah	3	0
6	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3	3
7	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	3	3
8	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3	3
9	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	3	3
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	3

No	Nama Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang	Kuesioner Disebar	Kuesioner Kembali
11	Dinas Ketahanan Pangan	3	3
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3	3
13	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	3	3
14	Dinas Lingkungan Hidup	3	3
15	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	3	3
16	Dinas Pekerjaan Umum	3	3
17	Dinas Pemadam Kebakaran	3	3
18	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	3
19	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3	3
20	Dinas Penataan Ruang	3	3
21	Dinas Pendidikan	3	3
22	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	3	3
23	Dinas Perdagangan	3	3
24	Dinas Perhubungan	3	3
25	Dinas Perikanan	3	3
26	Dinas Perindustrian	3	3
27	Dinas Pertanian	3	3
28	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3	3
29	Dinas Sosial	3	3
30	Dinas Tenaga Kerja	3	3
31	Inspektorat Pemerintah Kota Semarang	3	3
32	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pemerintah	3	3
33	RSUD KRMT Wongsonegoro	3	0
34	Satuan Polisi Pamong Praja	3	3
Total		102	96

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Dari total 102 kuesioner yang disebar, sebanyak 96 kuesioner (94,1%) berhasil dikembalikan, sedangkan 6 kuesioner (5,9%) tidak kembali. Data dari

kuesioner yang berhasil dikembalikan akan diolah untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini.

Responden dalam penelitian ini terdiri dari Kepala subbagian Keuangan/Akuntansi atau penatausahaan keuangan, Bendahara Penerimaan, dan Bendahara Pengeluaran di OPD Pemerintah Kota Semarang. Informasi mengenai profil responden diperoleh dari data yang terkumpul sebagai berikut.

Tabel 4.2 Gambaran Umum Responden

No	Uraian	Frekuensi	Presentase	
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	36	38%
		Perempuan	60	63%
2	Usia	≤ 20 Tahun	0	0%
		21-30 Tahun	27	28%
		31-40 Tahun	29	30%
		≥ 41 Tahun	40	42%
3	Tingkat Pendidikan	SMA	4	4%
		Diploma	11	11%
		S-1	65	68%
		S-2	16	17%
		S-3	0	0%
4	Masa Kerja	2 Tahun	34	35%
		3-4 Tahun	11	12%
		5-10 Tahun	17	18%
		> 10 Tahun	34	35%

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan informasi dari tabel 4.1, dapat dilihat bahwa gambaran responden berdasarkan jenis kelamin didominasi pegawai perempuan yaitu 60

orang atau 63% sedangkan responden pegawai laki-laki sebanyak 36 orang atau 38%.

Mayoritas responden dalam gambaran usia didominasi oleh pegawai yang berusia 41 tahun keatas dengan jumlah sebanyak 40 orang atau 42%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar dari responden berada dalam kategori usia yang lebih tua. Sementara itu, kelompok usia antara 21 hingga 30 tahun memiliki frekuensi 27 responden atau 28%, dan kelompok usia 31 hingga 40 tahun memiliki frekuensi 29 responden atau 30%.

Dari segi pendidikan, sebagian besar responden telah menyelesaikan pendidikan tinggi tingkat Sarjana dengan jumlah mencapai 65 orang atau 68%. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas pengelola keuangan telah memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai, serta telah memenuhi syarat minimal untuk menjalankan tugas-tugas pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan tingkat pendidikan mereka. Sebanyak 16 orang atau 17% merupakan lulusan program pascasarjana (Sarjana 2), 11 orang atau 11% memiliki latar belakang pendidikan Diploma, dan sisanya sebanyak 4 orang atau 4% memiliki latar belakang pendidikan terakhir SMA.

Berdasarkan masa kerja, gambar responden menunjukkan variasi yang signifikan. Sebanyak 34 orang atau 35% dari responden memiliki masa kerja selama 2 tahun, 11 orang atau 12% memiliki masa kerja 3-4 tahun, 17 orang atau 18% memiliki masa kerja 5-10 tahun, dan jumlah responden dengan masa kerja lebih dari 10 tahun mencapai 34 orang atau 35%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rata-rata masa kerja responden telah melampaui 5 tahun.

Hal ini menandakan bahwa mayoritas responden telah memiliki pengalaman yang cukup dalam mengelola keuangan daerah.

Berdasarkan data identitas responden, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan tinggi dan pengalaman kerja yang signifikan. Hal ini dapat dilihat dari persentase karakteristik identitas responden. Oleh karena itu, diharapkan jawaban-jawaban yang diberikan oleh responden dapat memberikan gambaran yang akurat mengenai keadaan yang sebenarnya.

4.2 Deskripsi Variabel

Untuk mengetahui tinggi rendahnya hasil pengukuran masing-masing variabel digunakan lima kategori yaitu sangat rendah, rendah, normal, tinggi, dan sangat tinggi. Maka nilai tertinggi yang diperoleh yaitu 5 dan nilai terendah 1, jadi diperoleh interval sebagai berikut:

$$i = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{jumlah kategori}}$$

$$i = \frac{5-1}{5}$$

$$i = \frac{4}{5} \text{ atau } 0,8$$

Dari penentuan nilai kelas tersebut, maka dapat ditemukan kategori adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3 Penilaian Analisis Deskriptif

Kategori	Interval
Sangat Tinggi	$4,2 \leq x \leq 5$
Tinggi	$3,4 \leq x < 4,2$
Normal	$2,6 \leq x < 3,4$

Rendah	$1,8 \leq x < 2,6$
Sangat Rendah	$1 \leq x < 1,8$

Variabel-variabel dalam penelitian ini diukur menggunakan metode statistik deskriptif dengan jumlah responden sebanyak 96. Variabel-variabel tersebut meliputi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan *good governance*, dan sistem pengendalian intern.

Tabel 4.4 Deskripsi Variabel Kualitas LKPD

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
1	Laporan keuangan yang saya susun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dengan informasi yang lengkap mencakup semua informasi akuntansi yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan	0	0	0	49	47	4,49	Sangat Tinggi
2	Laporan keuangan yang saya susun selesai secara tepat waktu sehingga dapat digunakan untuk pengambilan keputusan saat ini dan mengoreksi keputusan pengguna di masa lalu (<i>feedback value</i>)	0	0	0	55	41	4,43	Sangat Tinggi
3	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian masa yang	0	0	2	54	40	4,40	Sangat Tinggi

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
	akan datang (<i>predictive value</i>)							
4	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan menggambarkan dengan jujur transaksi dan peristiwa lainnya sehingga bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang bersifat material	0	0	0	43	52	4,54	Sangat Tinggi
5	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah benar dan memenuhi kebutuhan para pengguna dan tidak berpihak pada kepentingan pihak tertentu sehingga teruji kebenarannya	0	0	1	43	52	4,53	Sangat Tinggi
6	Informasi yang termuat dalam laporan keuangan yang saya susun selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya	0	0	0	48	48	4,50	Sangat Tinggi
7	Dalam penyusunan laporan keuangan, saya telah menggunakan kebijakan akuntansi yang berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dari tahun ke tahun	0	0	1	48	47	4,48	Sangat Tinggi
8	Laporan yang saya buat disusun secara sistematis sehingga mudah dimengerti dan dipahami	0	0	0	45	51	4,53	Sangat Tinggi

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
9	Informasi yang saya sajikan dalam laporan keuangan telah jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna	0	0	2	53	41	4,41	Sangat Tinggi

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel 4.4 tanggapan responden terhadap variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada pernyataan pertama memberikan penilaian positif dengan rata-rata tanggapan sebesar 4,49. Nilai rata-rata tersebut mencerminkan persetujuan dan keyakinan responden terhadap penyusunan laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Hal ini menandakan bahwa laporan keuangan dianggap sebagai dokumen yang memadai, memenuhi standar, dan menyediakan informasi akuntansi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan.

Pada pernyataan kedua, terlihat nilai rata-rata tanggapan responden sebesar 4,43. Nilai rata-rata tersebut mencerminkan bahwa responden menganggap laporan keuangan yang diselesaikan tepat waktu dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Hal ini memberikan gambaran positif terkait kualitas waktu penyusunan laporan keuangan dan fungsinya dalam mendukung pengambilan keputusan, termasuk kemampuannya untuk memberikan pandangan korektif terhadap keputusan masa lampau.

Dalam pernyataan ketiga, ditemukan bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,40. Nilai ini mengindikasikan bahwa informasi yang terdapat

dalam laporan keuangan dianggap dapat digunakan sebagai alat untuk memprediksi kejadian di masa mendatang. Dengan nilai tersebut, responden menyiratkan bahwa laporan keuangan memberikan landasan yang kuat untuk melakukan prediksi terhadap peristiwa atau kondisi yang mungkin terjadi di masa datang.

Pada pernyataan keempat, nilai rata-rata tanggapan responden mencapai 4,54. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden menganggap informasi dalam laporan keuangan mampu menggambarkan transaksi dan peristiwa lainnya dengan jujur, sehingga laporan tersebut bebas dari interpretasi yang menyesatkan dan kesalahan material. Nilai ini mencerminkan keyakinan responden bahwa laporan keuangan memberikan representasi yang akurat dan dapat dipercaya mengenai kondisi keuangan dan operasional.

Pada pernyataan kelima, dapat dilihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,53. Nilai ini mengindikasikan bahwa laporan keuangan dianggap dapat memenuhi kebutuhan pengguna, tidak memihak pada kepentingan tertentu, teruji kebenarannya, dan bersifat objektif. Hal ini mencerminkan pandangan positif terkait dengan kualitas keterbukaan, keadilan, dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah dalam menyajikan informasi kepada pemangku kepentingan.

Pada pernyataan keenam, dapat dilihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,50. Nilai ini menunjukkan keyakinan bahwa laporan keuangan selalu dapat dibandingkan dengan laporan keuangan dari periode sebelumnya. Dengan nilai tersebut, responden mengekspresikan keyakinan bahwa laporan keuangan ini menyajikan informasi secara konsisten dan dapat dengan mudah

dibandingkan untuk menganalisis perubahan atau tren dari satu periode ke periode lainnya.

Dari pernyataan ketujuh, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,48. Nilai ini menunjukkan keyakinan bahwa dalam proses penyusunan laporan keuangan, telah dilakukan penggunaan kebijakan akuntansi yang konsisten sesuai dengan pedoman Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Dengan nilai tersebut, responden menunjukkan kesadaran dan komitmen untuk menjaga konsistensi penggunaan standar akuntansi yang berperan dalam memastikan integritas dan keandalan laporan keuangan pemerintah daerah dari tahun ke tahun.

Pada pernyataan kedelapan, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,53. Nilai ini mengindikasikan bahwa laporan yang disusun dianggap telah dirancang secara sistematis, sehingga mudah dimengerti dan dipahami oleh para pengguna. Dengan nilai tersebut, responden menyiratkan persepsi positif terkait dengan keteraturan dan keterbacaan laporan keuangan yang mencerminkan keyakinan bahwa penyusunan laporan dilakukan secara terstruktur, mempermudah pemahaman informasi keuangan, dan mendukung transparansi dalam menyajikan data keuangan pemerintah daerah kepada para pemangku kepentingan.

Dari pernyataan kesembilan, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata 4,41. Nilai ini mengindikasikan bahwa laporan yang disajikan dianggap memberikan informasi yang jelas dan disajikan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan batas pemahaman para pengguna. Dengan nilai tersebut, responden

mengekspresikan keyakinan bahwa laporan keuangan telah disusun dengan mempertimbangkan tingkat pemahaman para pengguna, sehingga memberikan kualitas dalam penyajian informasi.

Tabel 4.5 Deskripsi Variabel Kualitas Aparatur Daerah

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
1	Saya memahami siklus akuntansi dengan baik	0	0	2	72	22	4,21	Sangat Tinggi
2	Saya memahami Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dengan baik	0	0	7	71	18	4,11	Tinggi
3	Saya sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dalam rangka meng- <i>upgrade</i> pengetahuan saya di bidang akuntansi	0	1	15	70	10	3,93	Tinggi
4	Saya telah mengerti peran dan fungsi yang jelas dalam pengelolaan keuangan	0	0	2	65	29	4,28	Sangat Tinggi
5	Saya menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya	0	0	1	65	30	4,30	Sangat Tinggi
6	Saya bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang telah ada	0	0	0	56	40	4,42	Sangat Tinggi
7	Pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada saya berguna untuk meningkatkan kinerja	0	0	5	58	33	4,29	Sangat Tinggi
8	Saya memahami materi pelatihan yang diberikan	0	0	4	70	22	4,19	Tinggi
9	Materi pelatihan yang saya ikuti diberikan	0	0	6	63	27	4,22	Sangat Tinggi

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
	sesuai dengan kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan							
10	Saya memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas di bidang akuntansi	0	0	8	65	23	4,16	Tinggi
11	Saya sudah berpengalaman di bidang akuntansi, sehingga dapat membantu saya mengurangi kesalahan dalam bekerja	0	1	20	58	17	3,95	Tinggi

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel 4.5 tanggapan responden terhadap variabel kualitas aparatur daerah pada pernyataan pertama memiliki rata-rata tanggapan sebesar 4,21. Nilai ini menggambarkan penilaian positif dari responden terhadap pemahaman siklus akuntansi oleh aparatur daerah. Dengan rata-rata tersebut, dapat disimpulkan bahwa responden secara umum dianggap memiliki pemahaman yang baik terkait dengan siklus akuntansi. Hal ini mencerminkan tingkat pengetahuan yang memadai dari pihak aparatur daerah dalam menjalankan proses akuntansi, sesuai dengan aspek yang dievaluasi dalam pernyataan pertama.

Pada pernyataan kedua, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,22. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden dianggap cukup memahami Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Hasil ini mencerminkan tingkat pemahaman yang memadai dari pihak

aparatur daerah terhadap aturan dan standar akuntansi yang berlaku, yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan efektif.

Dari pernyataan ketiga, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 3,93. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden dianggap cukup sering membaca literatur berupa jurnal akuntansi dalam rangka meningkatkan pengetahuan di bidang akuntansi. Meskipun nilai tersebut tidak termasuk sangat tinggi, yaitu di bawah 4,20, tetapi masih mencerminkan bahwa responden secara lumayan aktif dalam kegiatan literasi akuntansi. Keaktifan ini dianggap positif karena menunjukkan upaya responden untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan melalui literatur akademis.

Dari pernyataan keempat, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,28. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden dianggap mengerti peran dan fungsi secara jelas dalam pengelolaan keuangan. Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa para responden memiliki pemahaman yang baik terkait dengan peran dan fungsi dalam mengelola aspek keuangan. Hasil ini mencerminkan kesadaran dan pemahaman yang positif dari pihak aparatur daerah terhadap tanggung jawab dan fungsi dalam konteks pengelolaan keuangan entitas pemerintah daerah.

Pada pernyataan kelima, terlihat responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,30. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden dianggap menjalankan tugas sesuai dengan fungsi akuntansi yang sesungguhnya. Hasil ini mencerminkan bahwa aparatur daerah dianggap memiliki kinerja yang baik dalam menjalankan tanggung jawab akuntansi mereka.

Pada pernyataan keenam, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata 4,42. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden dianggap bekerja berdasarkan pedoman mengenai proses akuntansi yang telah ada. Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa para responden secara konsisten mengikuti pedoman dan prosedur yang dapat mencerminkan kesesuaian praktik kerja dengan pedoman yang berlaku.

Pada pernyataan ketujuh, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,29. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden percaya bahwa pendidikan dan pelatihan yang diberikan berguna untuk meningkatkan kinerja. Hal ini mencerminkan pentingnya investasi dalam pengembangan sumber daya manusia untuk memastikan peningkatan kualitas dan efisiensi aparatur daerah dalam menjalankan tugas mereka.

Pada pernyataan kedelapan, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,19. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden dianggap cukup memahami materi pelatihan yang telah diberikan. Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa para responden menunjukkan tingkat pemahaman yang baik terhadap materi pelatihan yang telah diterima.

Dari pernyataan kesembilan, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,22. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden percaya bahwa materi pelatihan yang mereka ikuti diberikan sesuai dengan kebutuhan sebagai fungsi pengelola keuangan. Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa para responden merasa materi pelatihan yang diberikan relevan dan sesuai dengan tuntutan fungsi keuangan yang dijalankan.

Dari pernyataan kesepuluh, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,16. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden cukup memiliki pengalaman untuk menjalankan tugas di bidang akuntansi. Meskipun rata-rata 4,16 berada di bawah ambang batas 4,20, nilai tersebut masih mencerminkan bahwa responden memiliki tingkat pengalaman yang cukup untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang akuntansi dengan baik.

Pada pernyataan kesebelas, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 3,95. Nilai ini mengindikasikan bahwa responden cukup berpengalaman di bidang akuntansi, sehingga membantu mengurangi kesalahan dalam bekerja. Pengalaman yang dimiliki oleh responden tetap dianggap sebagai faktor yang dapat memperkaya kualitas pekerjaan di bidang akuntansi, meskipun sedikit di bawah nilai rata-rata sangat tinggi yaitu 4,20.

Tabel 4.6 Deskripsi Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
1	Sub bagian keuangan (akuntansi/anggaran) memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas	0	0	3	49	44	4,43	Sangat Tinggi
2	Proses akuntansi sejak awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi	0	0	1	50	45	4,49	Sangat Tinggi
3	Pengolahan dan pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan <i>software</i> yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan	0	0	1	54	41	4,14	Tinggi

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
4	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi didukung ketersediaan perangkat keras (komputer) dan perangkat lunak (<i>software</i>) yang digunakan	0	0	0	50	46	4,48	Sangat Tinggi
5	Adanya jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur	0	0	10	57	29	4,18	Tinggi
6	Peralatan yang rusak/ usang didata dan diperbaiki tepat pada waktunya	0	0	10	60	26	4,17	Tinggi
7	Jaringan internet telah terpasang dan dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan	0	0	3	60	33	4,31	Sangat Tinggi

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel 4.6, tanggapan responden terhadap variabel pemanfaatan teknologi informasi pada pernyataan pertama memiliki rata-rata tanggapan sebesar 4,43. Nilai ini mengindikasikan bahwa sub bagian keuangan (akuntansi/ anggaran) tiap OPD dianggap memiliki komputer yang cukup untuk melaksanakan tugas. Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa para responden memberikan penilaian positif terhadap ketersediaan komputer yang dapat mencerminkan infrastruktur teknologi informasi di tingkat OPD dianggap memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas keuangan, seperti akuntansi dan anggaran.

Pada pernyataan kedua, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,49. Nilai ini mengindikasikan bahwa proses akuntansi, mulai dari

awal transaksi hingga pembuatan laporan keuangan dilakukan secara komputerisasi. Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa para responden memberikan penilaian sangat positif terhadap tingkat otomatisasi dalam pelaksanaan proses akuntansi. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi dalam mengelola transaksi keuangan dan penyusunan laporan keuangan dianggap sangat baik dan efisien.

Pada pernyataan ketiga, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,14. Nilai ini mengindikasikan bahwa pengolahan dan pengelolaan data transaksi keuangan menggunakan *software* yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di tiap OPD. Meskipun nilai, 4,14 berada di bawah ambang batas 4,20, nilai tersebut masih mencerminkan bahwa responden memberikan penilaian positif terhadap ketersediaan *software* yang sesuai dengan regulasi di tiap OPD. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun tidak mencapai nilai maksimal, infrastruktur teknologi informasi di tingkat OPD dianggap memadai untuk memproses dan mengelola data transaksi keuangan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dari pernyataan keempat, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,48. Nilai ini mengindikasikan bahwa di setiap OPD, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi didukung oleh ketersediaan perangkat keras dan lunak yang digunakan. Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa para responden memberikan penilaian positif terhadap ketersediaan dan penggunaan perangkat yang mendukung pemanfaatan teknologi informasi di setiap OPD. Hal

ini menunjukkan bahwa infrastruktur teknologi informasi di tingkat OPD dianggap sangat mendukung dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi.

Pada pernyataan kelima, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,18. Nilai ini mengindikasikan bahwa di setiap OPD terdapat jadwal pemeliharaan peralatan secara teratur. Hal ini menunjukkan kesadaran dan upaya untuk menjaga ketersediaan dan kinerja optimal peralatan teknologi informasi melalui pemeliharaan yang terjadwal secara teratur. Meskipun tidak mencapai nilai maksimal, nilai ini tetap menunjukkan praktik yang baik dalam pengelolaan teknologi informasi di tingkat OPD.

Dari pernyataan keenam, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,17. Nilai ini mengindikasikan bahwa di setiap OPD, peralatan yang rusak/ usang didata dan diperbaiki tepat pada waktunya. Hal ini menunjukkan adanya kebijakan atau prosedur yang efektif untuk mendata dan memperbaiki peralatan yang mengalami kerusakan secara tepat waktu. Meskipun tidak mencapai nilai maksimal, nilai ini tetap menunjukkan praktik yang baik dalam menjaga ketersediaan dan kualitas peralatan teknologi informasi di tingkat OPD.

Dari pernyataan ketujuh, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,31. Nilai ini mengindikasikan bahwa di setiap OPD, jaringan internet telah terpasang dan dimanfaatkan sebagai penghubung antar unit kerja dalam pengiriman data dan informasi. Dengan nilai tersebut, dapat disimpulkan bahwa para responden memberikan penilaian positif terhadap ketersediaan dan pemanfaatan jaringan internet. Hal ini menunjukkan bahwa infrastruktur jaringan

internet di tingkat OPD dianggap memadai untuk memadai untuk mendukung komunikasi dan pertukaran informasi.

Tabel 4.7 Deskripsi Variabel Penerapan *Good governance*

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
1	Masyarakat telah terlibat dalam program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan	0	0	14	69	13	3,99	Tinggi
2	OPD tempat saya bekerja selalu dilibatkan dalam melaksanakan kegiatan evaluasi pemerintah daerah	0	0	1	70	25	4,25	Sangat Tinggi
3	OPD tempat saya bekerja dalam menjalankan tugas operasionalnya selalu konsisten berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku	0	0	0	61	35	4,36	Sangat Tinggi
4	OPD tempat saya bekerja selalu bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran hukum atas kegiatan yang dilaksanakan	0	0	0	62	34	4,35	Sangat Tinggi
5	OPD tempat saya bekerja selalu membuat dan menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	0	0	0	67	29	4,30	Sangat Tinggi
6	OPD tempat saya bekerja memberikan akses secara terbuka atas masalah informasi yang wajib diketahui oleh publik seperti	0	0	5	60	31	4,27	Sangat Tinggi

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
	rencana strategis kebijakan anggaran yang dilaksanakan dan laporan secara periodik							
7	OPD tempat saya bekerja selalu merespon dan menindaklanjuti apabila terjadi keluhan masyarakat terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi yang menjadi tanggungjawabnya	0	0	2	59	35	4,34	Sangat Tinggi
8	Setiap kegiatan yang dilakukan didasari dengan musyawarah	0	0	2	71	23	4,22	Sangat Tinggi
9	Kebijakan OPD tempat saya bekerja selalu berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan	0	0	2	62	32	4,31	Sangat Tinggi
10	OPD tempat saya bekerja dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat baik internal maupun eksternal selalu bersifat adil dan tidak membeda-bedakan	0	0	1	67	28	4,28	Sangat Tinggi
11	OPD tempat saya bekerja memiliki komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara efisien dan efektif	0	0	1	62	33	4,33	Sangat Tinggi
12	Dalam penggunaan sumber daya, OPD	0	0	0	69	27	4,28	Sangat Tinggi

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
	tempat saya bekerja selalu berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal							
13	OPD tempat saya bekerja dalam operasionalnya menggunakan sumber daya baik berupa SDM dan sarana prasana selalu berorientasi kepada pencapaian tujuan dengan tepat waktu dan tepat biaya	0	0	2	59	35	4,34	Sangat Tinggi
14	Adanya kelalaian dan kemunduran pada OPD tempat saya bekerja terkait sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan	17	22	21	27	9	2,89	Normal
15	Visi dan misi yang ditetapkan oleh OPD tempat saya bekerja dapat dijadikan pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan sesuai dengan tupoksi organisasi	0	0	2	74	20	4,19	Tinggi

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel 4.7, tanggapan responden terhadap variabel penerapan *good governance* pada pernyataan pertama memiliki rata-rata tanggapan sebesar 3,99. Nilai ini mengindikasikan bahwa masyarakat telah terlibat dalam program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap partisipasi masyarakat dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam konteks penerapan *good governance*. Meskipun tidak

mencapai nilai maksimal, nilai ini tetap menunjukkan adanya dukungan dan keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan.

Pada pernyataan kedua, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,25. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap OPD selalu dilibatkan dalam melaksanakan evaluasi kegiatan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan adanya praktik evaluasi yang konsisten dan melibatkan setiap OPD untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah, sesuai dengan prinsip *good governance*.

Pada pernyataan ketiga, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,36. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap OPD dalam menjalankan tugas operasionalnya selalu konsisten berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencerminkan kesadaran dan komitmen dalam menjalankan tugas operasional sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang merupakan aspek penting dalam prinsip *good governance*.

Pada pernyataan keempat, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,35. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap OPD selalu bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran hukum atas kegiatan yang dilaksanakan, konsisten berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan kepatuhan terhadap norma hukum sebagai bagian dari penerapan *good governance* di tingkat OPD.

Pada pernyataan kelima, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,30. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap OPD selalu membuat dan menyampaikan laporan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan

yang berlaku. Hal ini mencerminkan keterbukaan, keteraturan, dan ketaatan terhadap prosedur pelaporan yang sesuai dengan prinsip *good governance* di tingkat OPD.

Dari pernyataan keenam, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,27. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap OPD memberikan akses secara terbuka atas masalah informasi yang wajib diketahui oleh publik, seperti rencana strategis kebijakan anggaran yang dilaksanakan dan laporan secara periodik. Hal ini mencerminkan transparansi dan akuntabilitas OPD dalam menyediakan informasi yang relevan dan wajib diketahui oleh masyarakat sesuai dengan prinsip *good governance*.

Pada pernyataan ketujuh, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,34. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap OPD selalu merespon dan menindaklanjuti apabila terjadi keluhan masyarakat terkait dengan program kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan tupoksi yang menjadi tanggung jawabnya. Hal ini mencerminkan prinsip akuntabilitas dan kepekaan terhadap aspirasi serta kebutuhan masyarakat yang menjadi bagian integral dari *good governance* di tingkat OPD.

Dari pernyataan kedelapan, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,22. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan didasari dengan musyawarah. Hal ini mencerminkan prinsip partisipasi dan demokrasi dalam pengambilan keputusan, yang merupakan aspek penting dari penerapan *good governance* di tingkat OPD.

Dari pernyataan kesembilan, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,31. Nilai ini mengindikasikan bahwa kebijakan di setiap OPD selalu berorientasi kepada kebutuhan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan. Hal ini mencerminkan prinsip keadilan, keberlanjutan, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat dalam pengambilan kebijakan di tingkat OPD, yang merupakan aspek esensial dari penerapan *good governance*.

Dari pernyataan kesepuluh, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,28. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap OPD dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, baik internal maupun eksternal selalu bersifat adil dan tidak membeda-bedakan. Hal ini mencerminkan komitmen kepada seluruh masyarakat, sesuai dengan prinsip *good governance*.

Pada pernyataan kesebelas, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,33. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap OPD memiliki komitmen memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara efisien dan efektif. Hal ini mencerminkan prinsip tata kelola yang baik dan orientasi pada hasil yang positif dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, sesuai dengan prinsip *good governance*.

Dari pernyataan kedua belas, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,28. Nilai ini mengindikasikan bahwa OPD dalam penggunaan sumber daya selalu berorientasi pada pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Hal ini mencerminkan komitmen untuk mengelola sumber daya dengan baik agar dapat memberikan dampak positif yang optimal sesuai dengan prinsip *good governance*.

Pada pernyataan ketiga belas, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata 4,34. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap OPD dalam operasionalnya menggunakan sumber daya, baik berupa sumber daya manusia maupun sarana prasarana, selalu berorientasi kepada pencapaian tujuan dengan tepat waktu dan tepat biaya. Hal ini mencerminkan prinsip tata kelola yang baik dalam pengelolaan sumber daya untuk mendukung pencapaian tujuan, sesuai dengan prinsip *good governance*.

Pada pernyataan keempat belas, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 2,89. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap OPD terdapat kelalaian dan kemunduran terkait sistem akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan. Hal ini menunjukkan adanya kebutuhan untuk perbaikan dan peningkatan dalam aspek-aspek tersebut guna memenuhi prinsip-prinsip *good governance*.

Dari pernyataan kelima belas, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,19. Nilai ini mengindikasikan bahwa setiap OPD menetapkan visi dan misi yang dapat dijadikan pedoman untuk mengarahkan pencapaian tujuan sesuai dengan tupoksi organisasi. Hal ini menunjukkan kesadaran dan komitmen untuk memiliki arah dan tujuan yang jelas dalam mencapai efektivitas dan efisiensi sesuai dengan prinsip *good governance*.

Tabel 4.8 Deskripsi Variabel Sistem Pengendalian Intern

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
1	Pimpinan selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai	0	0	1	69	26	4,26	Sangat Tinggi

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
2	Pimpinan telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik	0	0	1	67	28	4,28	Sangat Tinggi
3	Pimpinan selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku	0	0	2	69	25	4,24	Sangat Tinggi
4	Instansi telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam instansi	0	0	1	69	26	4,26	Sangat Tinggi
5	Pimpinan telah melakukan analisis resiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi	0	0	3	66	27	4,25	Sangat Tinggi
6	Pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi resiko pelanggaran terhadap prosedur sistem dan prosedur akuntansi	0	0	3	71	22	4,20	Sangat Tinggi
7	Kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik	0	0	2	69	25	4,24	Sangat Tinggi
8	Instansi pemerintah telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur	0	0	0	77	19	4,20	Sangat Tinggi
9	Setiap transaksi dan aktivitas di tempat saya	0	0	1	69	26	4,26	Sangat Tinggi

No	Pernyataan	STS	TS	KS	S	SS	Rata-Rata	Keterangan
	bekerja telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang							
10	Informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan korektif secara tepat	0	0	2	68	28	4,25	Sangat Tinggi
11	Saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan signifikan	0	0	3	62	31	4,29	Sangat Tinggi
12	Fungsi <i>controlling</i> dalam instansi tempat saya bekerja telah diterapkan dengan baik	0	0	2	63	31	4,30	Sangat Tinggi
13	Di tempat saya bekerja telah melakukan audit personalia (evaluasi kualitas, kuantitas, dan kegiatan personalia dalam kantor)	0	0	6	66	24	4,19	Tinggi

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan tabel 4.8, tanggapan responden terhadap variabel sistem pengendalian intern pada pernyataan pertama memiliki rata-rata tanggapan sebesar 4,26. Nilai ini mengindikasikan bahwa pimpinan selalu menetapkan aturan mengenai perilaku dan standar etika pegawai. Hal ini mencerminkan adanya komitmen pimpinan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip etika dan tata kelola yang baik untuk mengendalikan perilaku pegawai sesuai dengan prinsip sistem pengendalian intern.

Pada pernyataan kedua, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,28. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa pimpinan telah memberikan contoh dalam berperilaku mengikuti kode etik. Hal ini mencerminkan adanya kepemimpinan yang baik dan teladan yang positif dari pimpinan yang merupakan aspek penting dalam implementasi sistem pengendalian intern untuk menegakkan etika dan integritas di dalam organisasi.

Pada pernyataan ketiga, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,24. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa pimpinan selalu mengambil tindakan yang tegas atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku. Hal ini mencerminkan adanya komitmen dalam menjaga integritas dan disiplin di dalam organisasi sesuai dengan prinsip sistem pengendalian intern.

Pada pernyataan keempat, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,26. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa setiap OPD telah memiliki standar kompetensi untuk setiap tugas dan fungsi pada masing-masing posisi dalam setiap OPD. Hal ini mencerminkan upaya dalam menetapkan standar yang jelas untuk memastikan bahwa pegawai memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka di dalam organisasi.

Pada pernyataan kelima, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,25. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa pimpinan telah melakukan analisis risiko secara lengkap dan menyeluruh terhadap kemungkinan timbulnya pelanggaran terhadap sistem akuntansi. Hal ini mencerminkan kesadaran dan kewaspadaan pimpinan terhadap resiko yang mungkin muncul dalam operasional

dan sistem akuntansi, serta upaya untuk mengidentifikasi dan mengatasi risiko tersebut.

Pada pernyataan keenam, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,20. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa pimpinan selalu memiliki rencana pengelolaan atau mengurangi risiko pelanggaran terhadap sistem dan prosedur akuntansi. Hal ini menunjukkan komitmen pimpinan untuk menjaga integritas dan keandalan sistem akuntansi di dalam organisasi.

Pada pernyataan ketujuh, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,24. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa kebijakan dan prosedur pengamanan fisik atas aset telah ditetapkan dan diimplementasikan dengan baik. Hal ini mencerminkan upaya yang baik dalam menjaga keamanan dan integritas aset organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pengendalian intern.

Pada pernyataan kedelapan, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,20. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa setiap OPD telah mengembangkan rencana untuk identifikasi dan pengamanan aset infrastruktur. Hal ini menunjukkan keseriusan dan kesiapan OPD untuk melindungi dan menjaga keberlanjutan aset infrastruktur organisasi sesuai dengan prinsip-prinsip sistem pengendalian intern.

Pada pernyataan kesembilan, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,26. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa setiap transaksi dan aktivitas di tiap OPD telah didukung dengan otorisasi dari pihak yang berwenang. Hal ini mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip pengendalian intern di mana

setiap tindakan dan transaksi memerlukan persetujuan yang sesuai untuk memastikan keabsahan dan kewajaran operasional.

Pada pernyataan kesepuluh, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,25. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa informasi telah disediakan secara tepat waktu dan memungkinkan untuk dilakukan koreksi secara tepat. Hal ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas sistem pengendalian intern dalam menyediakan informasi yang relevan dan mendukung tindakan korektif sesuai dengan prinsip-prinsip pengendalian intern.

Pada pernyataan kesebelas, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,29. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa saluran komunikasi berkelanjutan telah dilaksanakan secara terbuka dan efektif dengan masyarakat, rekanan, dan aparat pengawas intern dalam memberikan masukan yang signifikan. Hal ini mencerminkan komitmen organisasi untuk membangun komunikasi yang transparan dan efektif sebagai bagian dari sistem pengendalian intern.

Pada pernyataan kedua belas, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,30. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa Fungsi *controlling* dalam instansi tempat saya bekerja telah diterapkan dengan baik. Hal ini mencerminkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan kontrol internal untuk memastikan pencapaian tujuan organisasi serta menjaga integritas dan efisiensi operasional.

Pada pernyataan ketiga belas, terlihat bahwa responden memberikan nilai rata-rata sebesar 4,19. Nilai tersebut mengindikasikan bahwa di tiap OPD telah melakukan audit personalia (evaluasi kualitas, kuantitas, dan kegiatan personalia

dalam kantor). Hal ini mencerminkan upaya organisasi dalam mengevaluasi kualitas, kuantitas, dan kegiatan personalia untuk memastikan bahwa sumber daya manusia di organisasi tersebut efektif dan sesuai dengan kebutuhan meskipun rata-rata sedikit di bawah ambang batas 4,20.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Uji Statistik Deskriptif

Gambar 4.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Kualitas Aparatur Daerah	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Penerapan Good Governance	Sistem Pengendalian Intern	Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Valid	96	96	96	96	96
Missing	0	0	0	0	0
Mean	46.05	30.46	62.72	55.22	40.30
Median	45.00	30.00	61.00	54.00	40.00
Std. Deviation	3.799	2.880	5.003	4.032	3.312
Minimum	34	25	52	43	35
Maximum	55	35	75	65	45

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Gambar yang disajikan dalam gambar 4.1 menunjukkan bahwa variabel kualitas aparatur daerah memiliki respons dengan nilai minimum 34 dan nilai maksimum 55. Ini mengindikasikan bahwa selama pengamatan, terdapat variasi antara nilai minimum sebesar 34% dan nilai maksimum sebesar 55%. Variasi ini mencerminkan perbedaan dalam penilaian responden terhadap kualitas aparatur daerah, dengan nilai minimum disebabkan karena adanya kekurangan dalam membaca literatur akuntansi sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan di bidang tersebut. Sementara nilai maksimum menandakan kesesuaian

dalam mengikuti pedoman proses akuntansi yang telah ada. Rata-rata respons sebesar 46.05 dengan nilai standar deviasi sebesar 3.799 dan median sebesar 45.00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas aparatur daerah memiliki sebaran yang merata karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari rata-ratanya dan tingkat akurasinya baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari median.

Variabel pemanfaatan teknologi informasi menunjukkan respons dengan nilai minimum 25 dan maksimum 35, menunjukkan variasi antara nilai minimum dan maksimum selama pengamatan. Variasi ini mencerminkan perbedaan penilaian responden terhadap pemanfaatan teknologi informasi. Nilai minimum mungkin disebabkan oleh kurangnya jadwal pemeliharaan peralatan dan penundaan perbaikan peralatan yang rusak atau usang, sedangkan nilai maksimum terkait dengan optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi yang didukung oleh perangkat keras dan lunak yang memadai. Rata-rata respons adalah 30,46 dengan standar deviasi sebesar 2,880 dan median sebesar 30,00. Dengan demikian, variabel pemanfaatan teknologi informasi dapat dikatakan memiliki sebaran yang merata karena nilai standar deviasi lebih kecil dari rata-ratanya, dan tingkat akurasi baik karena nilai rata-ratanya lebih tinggi dari median.

Variabel penerapan *good governance* memiliki respons dengan nilai minimum 52 dan nilai maksimum 75. Ini mengindikasikan bahwa selama pengamatan, terdapat variasi antara nilai minimum sebesar 52% dan nilai

maksimum sebesar 75%. Dari data tersebut terlihat bahwa nilai minimum disebabkan karena kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program pemberdayaan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nilai maksimum mencerminkan konsistensi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kota Semarang dalam menjalankan tugas operasionalnya dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, rata-rata respons adalah 62.72 dengan nilai standar deviasi sebesar 5.003 dan median sebesar 61.00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel penerapan *good governance* memiliki sebaran yang merata karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari rata-ratanya dan tingkat akurasi baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari median.

Variabel sistem pengendalian intern memiliki respons dengan nilai minimum 43 dan nilai maksimum 65. Ini mengindikasikan bahwa selama pengamatan, terdapat variasi antara nilai minimum sebesar 43% dan nilai maksimum sebesar 65%. Dari data tersebut terlihat bahwa nilai minimum terjadi karena kurangnya pelaksanaan audit personalia yang mencakup evaluasi terhadap kualitas, kuantitas, dan kegiatan personalia. Nilai maksimum mencerminkan implementasi yang baik dari fungsi *controlling* dalam instansi tempat bekerja, menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal telah diterapkan dengan efektif. Sementara itu, rata-rata respons adalah 55.22 dengan nilai standar deviasi sebesar 4.032 dan median sebesar 54.00. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel sistem pengendalian intern memiliki sebaran yang merata

karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari rata-ratanya dan tingkat akurasiya baik karena nilai rata-ratanya lebih besar dari median.

Variabel kualitas laporan keuangan pemerintah daerah menunjukkan respons dengan nilai minimum 35 dan maksimum 45. Selama pengamatan, terdapat variasi antara nilai minimum sebesar 35% dan nilai maksimum sebesar 45%. Data tersebut menggambarkan bahwa nilai minimum disebabkan oleh kurangnya penggunaan informasi dalam laporan keuangan untuk memprediksi kejadian masa *depan* (*predictive value*), sementara nilai maksimum terjadi karena tingginya kualitas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang secara jujur menggambarkan transaksi dan peristiwa lainnya. Hal ini menjadikan laporan keuangan bebas dari interpretasi yang menyesatkan dan kesalahan material.

Rata-rata respons untuk variabel ini adalah 40,30 dengan nilai standar deviasi sebesar 3,312 dan median sebesar 40,00. Dengan demikian, variabel kualitas laporan keuangan pemerintah menunjukkan sebaran yang merata karena nilai standar deviasinya lebih kecil dari rata-ratanya. Tingkat akurasiya juga baik karena nilai rata-ratanya lebih besar daripada median.

4.3.2 Uji Instrumen

4.3.2.1 Uji Validitas

Pengujian validitas data dilakukan untuk mengevaluasi sejauh mana kuesioner yang digunakan memberikan hasil yang

akurat dan sesuai dengan tujuan penelitian. Uji validitas menggunakan *Pearson Correlation*, dimana suatu data dianggap valid jika koefisien korelasi (r hitung) lebih besar daripada nilai r-tabel.

Tabel 4.9 Uji Validitas Data

Variabel	Pernyataan	R-hitung	R-Tabel	Keterangan
Kualitas Aparatur Daerah (X ₁)	X1.1	0.637	0,2006	Valid
	X1.2	0.729	0,2006	Valid
	X1.3	0.538	0,2006	Valid
	X1.4	0.729	0,2006	Valid
	X1.5	0.696	0,2006	Valid
	X1.6	0.643	0,2006	Valid
	X1.7	0.675	0,2006	Valid
	X1.8	0.693	0,2006	Valid
	X1.9	0.775	0,2006	Valid
	X1.10	0.642	0,2006	Valid
	X1.11	0.517	0,2006	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi (X ₂)	X2.1	0.736	0,2006	Valid
	X2.2	0.749	0,2006	Valid
	X2.3	0.790	0,2006	Valid
	X2.4	0.705	0,2006	Valid
	X2.5	0.782	0,2006	Valid
	X2.6	0.745	0,2006	Valid
	X2.7	0.754	0,2006	Valid
Penerapan <i>Good governance</i> (X ₃)	X3.1	0.433	0,2006	Valid
	X3.2	0.696	0,2006	Valid
	X3.3	0.713	0,2006	Valid
	X3.4	0.685	0,2006	Valid
	X3.5	0.634	0,2006	Valid
	X3.6	0.569	0,2006	Valid
	X3.7	0.766	0,2006	Valid
	X3.8	0.508	0,2006	Valid
	X3.9	0.688	0,2006	Valid
	X3.10	0.676	0,2006	Valid
	X3.11	0.667	0,2006	Valid
	X3.12	0.766	0,2006	Valid
	X3.13	0.799	0,2006	Valid
	X3.14	0.376	0,2006	Valid

Variabel	Pernyataan	R-hitung	R-Tabel	Keterangan
	X3.15	0.675	0,2006	Valid
Sistem Pengendalian Intern (X ₄)	X4.1	0.711	0,2006	Valid
	X4.2	0.649	0,2006	Valid
	X4.3	0.598	0,2006	Valid
	X4.4	0.694	0,2006	Valid
	X4.5	0.612	0,2006	Valid
	X4.6	0.656	0,2006	Valid
	X4.7	0.494	0,2006	Valid
	X4.8	0.657	0,2006	Valid
	X4.9	0.571	0,2006	Valid
	X4.10	0.671	0,2006	Valid
	X4.11	0.715	0,2006	Valid
	X4.12	0.686	0,2006	Valid
	X4.13	0.686	0,2006	Valid
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y)	Y.1	0.796	0,2006	Valid
	Y.2	0.771	0,2006	Valid
	Y.3	0.701	0,2006	Valid
	Y.4	0.712	0,2006	Valid
	Y.5	0.691	0,2006	Valid
	Y.6	0.635	0,2006	Valid
	Y.7	0.688	0,2006	Valid
	Y.8	0.675	0,2006	Valid
	Y.9	0.786	0,2006	Valid

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan dari tabel 4.9 yang disajikan, dapat dinyatakan bahwa seluruh data yang diperoleh terbukti valid. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil perhitungan korelasi (r -hitung) > r -tabel dengan taraf signifikansi 5%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap item pernyataan yang terkandung dalam variabel penelitian memiliki validitas yang dapat dipercaya.

4.3.2.2 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai sejauh mana suatu instrumen atau kuesioner dapat diandalkan dan memberikan hasil yang konsisten. Salah satu metode yang umum digunakan untuk mengukur reliabilitas adalah dengan menggunakan *Cronbach's Alpha*. Jika nilai *Cronbach's Alpha* > 0.60, maka instrumen tersebut dianggap reliabel.

Tabel 4.10 Uji Reliabilitas Data

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kualitas Aparatur Daerah	0.866	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.871	Reliabel
Penerapan <i>Good Governance</i>	0.859	Reliabel
Sistem Pengendalian Intern	0.883	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	0.882	Reliabel

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan dari tabel 4.10 yang disajikan, dapat dinyatakan bahwa setiap variabel terbukti reliabel. Hal ini dikonfirmasi oleh nilai *Cronbach's Alpha* yang lebih besar dari 0.60. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa setiap variabel penelitian dianggap reliabel.

4.3.3 Uji Asumsi Klasik

4.3.3.1 Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk menilai sejauh mana distribusi data mengikuti pola distribusi normal. Uji ini membantu peneliti menentukan apakah data yang dimiliki terdistribusi secara normal atau tidak. Salah satu metode untuk uji normalitas adalah uji *Kolmogorov-Smirnov Test*.

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.85922130
Most Extreme Differences	Absolute	.087
	Positive	.087
	Negative	-.082
Test Statistic		.087
Asymp. Sig. (2-tailed)		.069 ^c

a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Gambar 4.2 diatas menunjukkan hasil uji normalitas di mana nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0.069, yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang umumnya ditetapkan pada 0.05. berdasarkan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0.05, dapat

disimpulkan bahwa data yang diujikan dapat dianggap berdistribusi normal.

4.3.3.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas digunakan untuk mengevaluasi sejauh mana variabel bebas dalam analisis regresi saling berkorelasi. Penilaian dilakukan dengan melihat nilai *tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Dalam perspektif nilai *tolerance*, jika nilai suatu variabel lebih besar dari 0.10 atau VIF lebih kecil dari 10, variabel tersebut dianggap bebas dari gejala multikolinearitas.

Gambar 4.3 Hasil Uji Multikolinearitas



Coefficients^a

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Kualitas Aparatur Daerah	.734	1.362
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.657	1.521
	Penerapan Good Governance	.339	2.948
	Sistem Pengendalian Intern	.344	2.908

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Berdasarkan dari gambar 4.3 yang disajikan, dapat simpulkan bahwa nilai *tolerance* untuk semua variabel menunjukkan $VIF < 10$ dan nilai *tolerance* juga lebih besar dari 0.10. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi tidak

mengalami gejala multikolinearitas atau berkorelasi. Dengan demikian, hasil ini memberikan keyakinan bahwa variabel-variabel dalam analisis regresi tidak saling berkorelasi secara signifikan serta memperkuat keandalan model regresi dan kepercayaan terhadap hasil estimasi koefisien regresi yang diperoleh.

4.3.4 Uji Model

4.3.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi bertujuan untuk mengukur seberapa besar variabilitas dalam variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Hasil uji ini sering dinyatakan dalam nilai *Adjusted R Square*.

Gambar 4.4 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.819 ^a	.670	.656	1.198

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Good Governance

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

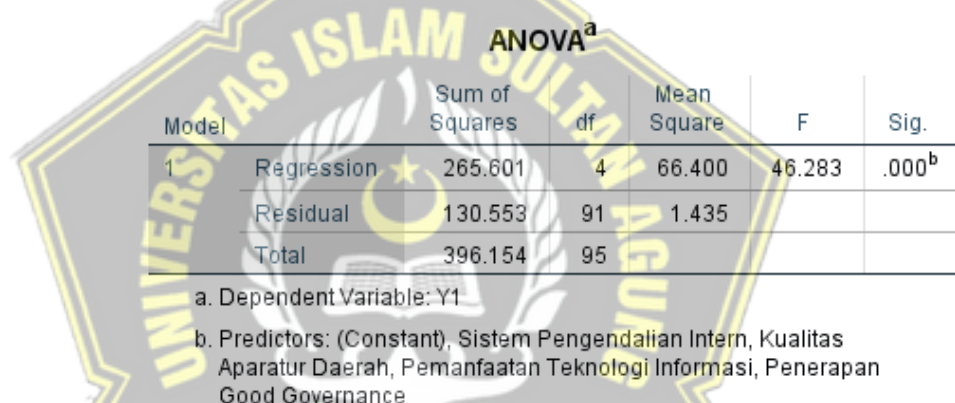
Dari gambar 4.4 yang tersedia, dapat disimpulkan bahwa koefisien determinasi sebesar 0.656 yang diukur menggunakan *Adjusted R Square*. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel independen yang diikutsertakan dalam model dapat menjelaskan sekitar 65.6% dari variasi dalam variabel dependen. Sisanya,

sekitar 34.4% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

4.3.4.2 Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji signifikansi simultan atau uji F dilakukan untuk menilai apakah ada pengaruh bersama-sama dari semua variabel bebas terhadap variabel terikat. Hasil dari uji signifikansi simultan ini diindikasikan oleh nilai F-hitung dan p-value yang terkait.

Gambar 4.5 Hasil Uji Statistik F



Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	265.601	4	66.400	46.283	.000 ^b
	Residual	130.553	91	1.435		
	Total	396.154	95			

a. Dependent Variable: Y1
 b. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Intern, Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan Good Governance

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Dari gambar 4.5 diatas, diperoleh nilai F-hitung sebesar 46.283 dengan nilai signifikansi (p-value) sebesar 0.000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yaitu 0.05. Kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa variabel secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat.

4.3.5 Uji Hipotesis

4.3.5.1 Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji T)

Uji signifikansi parameter individual atau uji T dilakukan untuk menilai apakah masing-masing variabel bebas memiliki

pengaruh signifikan terhadap variabel terikat dalam model regresi. Dengan melakukan uji T pada setiap variabel bebas, dapat mengetahui variabel mana yang memberikan kontribusi signifikan dalam menjelaskan variabilitas dalam variabel terikat.

Gambar 4.6 Hasil Uji T

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	15.916	1.921		8.285	.000
	Kualitas Aparatur Daerah	.218	.038	.405	5.763	.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.291	.053	.410	5.522	.000
	Penerapan Good Governance	.043	.042	.106	1.026	.308
	Sistem Pengendalian Intern	.051	.052	.100	.975	.332

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Pengujian hipotesis menggunakan *software* statistik SPSS 26.0, dilakukan pengujian persamaan regresi secara individual terhadap setiap variabel independen dan hasil hipotesis dari pengujian regresi regresi adalah sebagai berikut.

1. Hipotesis 1: Kualitas aparatur daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dari gambar 4.6 diatas, hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.000, yang lebih kecil dari tingkat

signifikansi yang ditetapkan sebesar 0.05. Oleh karena itu, hipotesis 1 diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas aparatur daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan kata lain, variabel kualitas aparatur daerah memberikan kontribusi yang penting dan berarti dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulan ini memperkuat hipotesis 1 yang menyatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara kualitas aparatur daerah dengan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

2. Hipotesis 2: Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dari gambar 4.6 diatas, hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikan sebesar 0.000, yang lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan pada 0.05. Oleh karena itu, hipotesis 2 diterima dan dapat disimpulkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil ini mengkonfirmasi hipotesis 2 yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan

kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Kesimpulan ini memberikan dukungan empiris terhadap peranan positif teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan entitas pemerintah daerah.

3. Hipotesis 3: Penerapan *good governance* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dari gambar 4.6 diatas, hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.308 yang lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0.05. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hipotesis 3, yang menyatakan bahwa variabel penerapan *good governance* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tidak dapat diterima berdasarkan hasil uji regresi ini. Dengan kata lain, variabel penerapan *good governance* tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4. Hipotesis 4: Sistem pengendalian intern berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Dari gambar 4.6 diatas, hasil uji regresi menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.332 yang lebih besar dari tingkat

signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0.05. Oleh karena itu, kesimpulan yang dapat diambil adalah bahwa hipotesis 4, yang menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, tidak dapat diterima berdasarkan hasil uji regresi ini. Dengan kata lain, variabel sistem pengendalian intern tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

4.3.5.2 Regresi Linear Berganda

Uji linear berganda dilakukan untuk mengetahui hubungan linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Analisis ini menggunakan *software* SPSS 26.0.

Gambar 4.7 Hasil Regresi Linear

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error			
1	(Constant)	15.916	1.921		8.285	.000
	Kualitas Aparatur Daerah	.218	.038	.405	5.763	.000
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	.291	.053	.410	5.522	.000
	Penerapan Good Governance	.043	.042	.106	1.026	.308
	Sistem Pengendalian Intern	.051	.052	.100	.975	.332

a. Dependent Variable: Y1

Sumber: *Data Primer yang diolah, 2024*

Dari tabel 4.7 diatas dapat dirumuskan dalam persamaan regresi sebagai berikut.

$$Y = 15.916 + 0.218X_1 + 0.291X_2 + 0.043X_3 + 0.051X_4$$

Dari persamaan diatas dapat diartikan bahwa:

1. Nilai konstanta yang didapat sebesar 15.916, maka memiliki arti bahwa apabila Variabel Kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan *good governance*, dan sistem pengendalian intern Nilai Konstantanya diasumsikan bernilai 0 maka nilai kualitas LKPD adalah 15,916
2. Nilai koefisien regresi variabel Kualitas aparatur daerah bernilai positif sebesar 0.218 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel Kualitas aparatur daerah akan menyebabkan kenaikan pada kualitas LKPD sebesar 0.218
3. Nilai koefisien regresi variabel Pemanfaatan teknologi informasi bernilai positif sebesar 0.291 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel Pemanfaatan teknologi informasi akan menyebabkan kenaikan pada kualitas LKPD sebesar 0.291
4. Nilai koefisien regresi variabel Penerapan *good governance* bernilai positif sebesar 0.043 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel Penerapan *good*

governance akan menyebabkan kenaikan pada kualitas LKPD sebesar 0.043

5. Nilai koefisien regresi variabel sistem pengendalian intern bernilai positif sebesar 0.051 maka memiliki arti bahwa apabila ada kenaikan 1% variabel sistem pengendalian intern akan menyebabkan kenaikan pada kualitas LKPD sebesar 0.051

4.4 Pembahasan Hasil Penelitian

4.4.1 Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis data, dapat ditemukan bahwa variabel Kualitas Aparatur Daerah memiliki nilai koefisien sebesar 0.218 dengan tingkat signifikansi 0.000. Fakta bahwa nilai signifikansi (0.000) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0.05) mengindikasikan bahwa Kualitas Aparatur Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, disimpulkan bahwa hipotesis 1 (H_1) yang menyatakan bahwa Kualitas Aparatur Daerah mempunyai pengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini, Aparatur pada Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kota Semarang terbukti memiliki kompetensi yang baik dalam menyusun laporan keuangan, yang pada akhirnya menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hal ini menunjukkan bahwa para

aparaturnya memiliki kemampuan dan keterampilan yang memadai dalam proses penyusunan laporan keuangan, yang dapat diandalkan untuk memenuhi standar dan kebutuhan akuntansi pemerintah daerah. Selain itu, dengan adanya Aparatur Daerah yang berkualitas, proses pengelolaan keuangan pemerintah daerah juga dapat berjalan lebih efisien dan efektif, sehingga menciptakan kepercayaan yang lebih besar dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap kualitas laporan keuangan yang disajikan.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hidayat *et al.* (2021) menunjukkan bahwa Kualitas Aparatur Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menegaskan bahwa semakin tinggi kualitas aparatur daerah, semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Sementara Sari (2022) menunjukkan hasil sebaliknya yaitu kualitas aparatur pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Batang.

4.4.2 Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki nilai koefisien sebesar 0.291 dengan tingkat signifikansi 0.000. Fakta bahwa nilai signifikansi (0.000) lebih kecil dari tingkat signifikansi yang ditetapkan (0.05) mengindikasikan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi memiliki

pengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 (H₂) yang menyatakan bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mendapatkan dukungan dari hasil analisis ini.

Tanggung jawab Pemerintah Daerah adalah mengembangkan dan menggunakan kemajuan dalam teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan dalam menyampaikan informasi keuangan kepada masyarakat. Dengan pemanfaatan Teknologi Informasi yang efektif, proses pengumpulan, pengolahan, dan pelaporan data keuangan dapat dilakukan dengan lebih efisien dan akurat. Penggunaan sistem informasi keuangan yang canggih dapat mengurangi kesalahan manusia dalam pembuatan laporan, meningkatkan transparansi dan keterbukaan informasi keuangan, serta mempercepat waktu penyusunan dan penyajian laporan. Selain itu, Teknologi Informasi yang baik juga dapat memungkinkan adopsi praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan, seperti penggunaan analisis data untuk pengambilan keputusan yang lebih baik. Ini semua dapat meningkatkan keandalan, relevansi, dan nilai informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan terhadap laporan keuangan tersebut.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Ayuningtyas *et al.* (2022) menunjukkan bahwa Pemanfaatan Teknologi

Informasi berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hal ini menegaskan bahwa semakin baik pemanfaatan teknologi informasi, semakin baik pula laporan keuangan yang dihasilkan. Namun, berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan Sintia, dkk (2022) yang menyimpulkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kabupaten Oki.

4.4.3 Pengaruh Penerapan *Good governance* Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa variabel Penerapan *Good governance* memiliki koefisien sebesar 0.043 dengan tingkat signifikansi 0.308. Karena nilai signifikansi (0.308) lebih besar dari batas yang ditetapkan (0.05), ini menunjukkan bahwa penerapan *good governance* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini, tidak ditemukan bukti bahwa Penerapan *Good governance* berdampak pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang kurang melibatkan masyarakat dalam program pemberdayaan guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memahami kinerja pemerintah, sering kali hanya berfokus pada kebenaran informasi tanpa terlibat secara aktif dalam proses penyampaian informasi tersebut. Keith David mengungkapkan bahwa

keterlibatan masyarakat melibatkan berbagai teknik untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Ini termasuk partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program publik (Riyanto & Kovalenko, 2023). Dalam konteks ini, keterlibatan masyarakat bukan hanya tentang memberikan informasi kepada mereka, tetapi juga tentang memberi mereka kesempatan untuk berkontribusi secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Dengan melibatkan masyarakat dalam berbagai tahap program publik, pemerintah dapat memastikan bahwa kebijakan dan program yang diimplementasikan benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga meningkatkan legitimasi dan efektivitas program tersebut.

Keterlibatan masyarakat yang rendah dapat mengurangi akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam pelaksanaan program. Dalam penelitian Ardiyanti (2019) ditemukan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan ADD berpengaruh pada pemberdayaan masyarakat; tanpa keterlibatan masyarakat dalam proses pengelolaan keuangan, akuntabilitas terganggu. Selain itu, transparansi informasi menjadi krusial karena memungkinkan masyarakat untuk mengawasi penggunaan anggaran sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Jika masyarakat tidak terlibat, risiko adanya informasi yang disembunyikan oleh pihak berwenang meningkat, sehingga transparansi terganggu (Purnama, 2020). Selanjutnya, efektivitas program juga bergantung pada

partisipasi masyarakat; jika tidak ada keterlibatan, program sulit mencapai tujuan yang diharapkan. Penelitian oleh Jesa & Fahmi (2020) menunjukkan peningkatan partisipasi masyarakat setelah menerapkan *Technology of Participation* (ToP) dalam program pemberdayaan, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mencapai efektivitas program.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Sari (2022) menunjukkan bahwa *Good governance* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Penyebabnya tidak jauh terkait dengan kurangnya penerapan transparansi informasi, baik dalam aspek keuangan maupun non-keuangan di Kabupaten Batang. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Rahmadani & Zulaika (2023) serta Rahman, dkk (2023) yang menunjukkan bahwa *Good governance* berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

4.4.4 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan bahwa variabel Sistem Pengendalian Intern memiliki koefisien sebesar 0.051 dengan tingkat signifikansi 0.332. Karena nilai signifikansi (0.332) lebih besar dari batas yang ditetapkan (0.05), ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

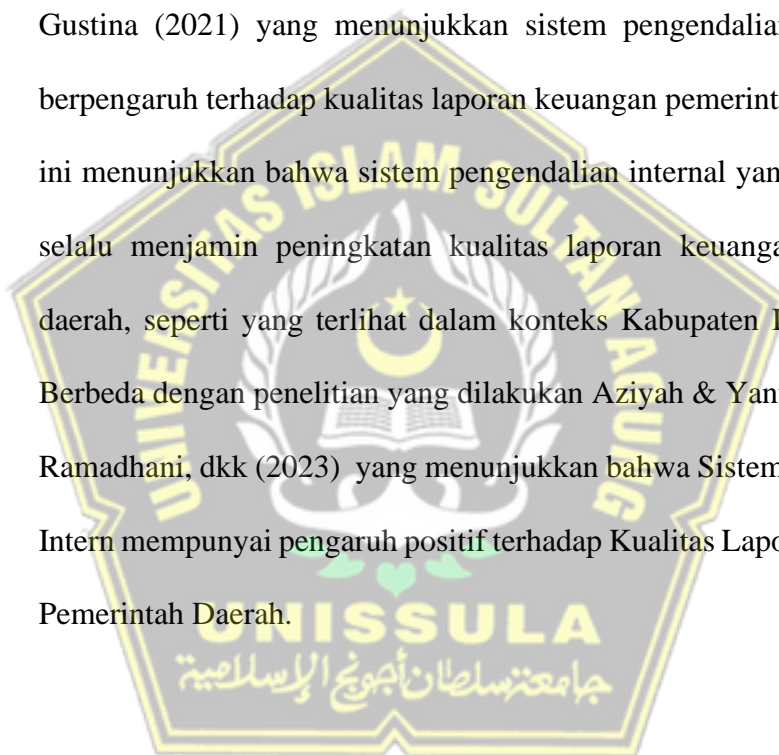
Dalam penelitian ini, tidak ditemukan bukti bahwa Sistem Pengendalian Intern berdampak pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Salah satu faktor yang mendasari hal ini adalah kurangnya evaluasi terhadap kualitas, kuantitas, dan kegiatan personalia lainnya dalam kantor pemerintah. Kurangnya evaluasi kinerja pegawai dapat menghambat efisiensi dan efektivitas dalam penyusunan laporan keuangan. Evaluasi yang tidak memadai tidak hanya menghalangi pengembangan karyawan tetapi juga menyebabkan penurunan kualitas sumber daya manusia, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh (Rahman et al., 2023) memperkuat temuan ini yang menunjukkan bahwa kurangnya evaluasi dapat disebabkan oleh lemahnya pengawasan. Pengawasan yang baik dan maksimal sangat penting dalam pencapaian keberhasilan. Tanpa pengawasan yang memadai, proses evaluasi menjadi kurang efektif, sehingga menghambat pengembangan karyawan dan kualitas laporan keuangan.

Evaluasi kinerja pegawai yang tidak optimal dapat mengganggu pengelolaan sumber daya manusia secara keseluruhan, yang berdampak negatif pada kinerja organisasi dan kualitas laporan keuangan. Tingkat akuntabilitas juga menurun jika evaluasi pengelolaan keuangan kurang baik, sehingga kualitas laporan keuangan dapat terpengaruh dan merusak reputasi instansi terkait (Tendean et al., 2023). Penelitian yang dilakukan

(Syahni & Rizki, 2023) menegaskan pentingnya evaluasi kinerja pegawai dalam meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas laporan keuangan. Evaluasi yang tepat dapat meningkatkan kualitas kinerja pegawai dan pengelolaan sumber daya manusia, yang pada gilirannya meningkatkan kualitas kinerja organisasi dan laporan keuangan yang dihasilkan.

Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Gustina (2021) yang menunjukkan sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal yang efektif tidak selalu menjamin peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti yang terlihat dalam konteks Kabupaten Indragiri Hilir. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan Azyiah & Yanto (2022) serta Ramadhani, dkk (2023) yang menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern mempunyai pengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.



BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Semarang mengenai pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Penerapan *Good governance*, dan Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan total 34 OPD dan 96 responden, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1) Kualitas Aparatur Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dengan kata lain hipotesis pertama (H_1) pada penelitian ini diterima.
- 2) Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dengan kata lain hipotesis kedua (H_2) pada penelitian ini diterima.
- 3) Penerapan *Good governance* tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dengan kata lain hipotesis ketiga (H_3) pada penelitian ini ditolak.
- 4) Sistem Pengendalian Intern tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. Dengan kata lain hipotesis keempat (H_4) pada penelitian ini ditolak.

5.2 Implikasi

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi yang dapat diambil antara lain:

1) Implikasi Teoritis

Penelitian ini memberikan kontribusi bagi akademisi dalam memahami faktor-faktor yang memengaruhi kualitas LKPD di tingkat lokal, khususnya dalam konteks Pemerintah Kota Semarang. Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lebih lanjut di bidang akuntansi pemerintahan, manajemen keuangan publik, dan studi terkait lainnya, guna mengembangkan teori dan kerangka kerja yang lebih baik dalam memahami hubungan antara variabel-variabel tersebut.

2) Implikasi Praktisi

Bagi praktisi, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga dalam pengelolaan keuangan publik di Kota Semarang. Implikasi ini dapat membantu pemerintah daerah dan lembaga terkait untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penyusunan serta pengelolaan LKPD. Selain itu, temuan ini juga dapat memberikan masukan bagi praktisi untuk meningkatkan kualitas aparatur, memanfaatkan teknologi informasi secara optimal, menerapkan praktik *good governance*, dan memperkuat sistem pengendalian intern guna meningkatkan kualitas LKPD dan memenuhi tuntutan akuntabilitas publik.

5.3 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa keterbatasan yang mungkin memengaruhi hasilnya. Keterbatasan-keterbatasan tersebut antara lain:

- 1) Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa kuesioner dan data diperoleh berdasarkan persepsi responden. Hal ini memungkinkan adanya perbedaan antara jawaban responden dengan keadaan sebenarnya.
- 2) Penelitian ini juga terbatas pada beberapa variabel, yaitu kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan *good governance*, dan sistem pengendalian intern. Ada variabel lain yang mungkin juga memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, seperti budaya organisasi dan lain sebagainya, yang belum ditinjau dalam penelitian ini. Menurut Nurhidayah & B (2020), budaya kerja organisasi memiliki hubungan signifikan dengan opini audit. Hal ini terlihat dari penerapan lima budaya kerja di Pemerintahan Kabupaten Majene yang berhubungan dengan perolehan opini audit wajar tanpa pengecualian, yaitu budaya Transparansi, Etika Publik, Komunikatif, Anti Korupsi, serta Disiplin dan Teliti. Kelima budaya ini, yang dikenal dengan istilah TEKAD, diterapkan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Transparansi dalam penyajian laporan, pemahaman etika publik, kesadaran akan peran sebagai pelayan publik, penegakan nilai anti korupsi, disiplin dalam ketepatan waktu pelaporan, dan ketelitian dalam setiap tahap penyusunan laporan merupakan elemen penting dari budaya tersebut. Dengan demikian, budaya organisasi dapat dijadikan faktor yang memengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
- 3) Kemungkinan adanya rasa takut di pihak responden ketika diminta untuk mengisi kuesioner. Rasa takut ini dapat timbul karena adanya kekhawatiran

terkait kerahasiaan atau konsekuensi dari informasi yang responden berikan. Hal ini dapat berdampak pada kejujuran dan keakuratan respon yang diberikan responden, sehingga memengaruhi validitas dan reliabilitas data yang dikumpulkan melalui kuesioner.

- 4) Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam hal. Pada akhir dan awal tahun menjadi periode sibuk bagi pegawai bagian keuangan karena adanya tugas-tugas pelaporan akhir tahun yang membutuhkan perhatian khusus. Selain itu, proses disposisi surat juga memakan waktu yang tidak sedikit. Kondisi ini membuat waktu yang tersedia untuk melakukan penelitian menjadi terbatas, sehingga memengaruhi kemampuan peneliti untuk mengumpulkan data dengan menyeluruh dan mendalam.
- 5) Dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kota Semarang yang tidak diambil sampelnya oleh penulis adalah BPKAD Kota Semarang dan RSUD KRMT Wongsonegoro. Alasan untuk tidak mengambil sampel dari BPKAD karena pada saat itu sedang melakukan pembaruan sistem keuangan yang akan digunakan oleh seluruh OPD Pemerintah Kota Semarang. Proses ini termasuk pembaruan *website* keuangan, yang dijadwalkan akan selesai hingga bulan Maret. Sementara itu, alasan untuk tidak mengambil sampel dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) KRMT Wongsonegoro karena biaya yang diperlukan untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dianggap cukup tinggi oleh penulis. Oleh karena itu, penulis memutuskan untuk tidak melakukan penelitian RSUD KRMT Wongsonegoro.

5.4 Saran

Berdasarkan dari hasil analisis, pembahasan, dan keterbatasan yang telah diidentifikasi dalam penelitian ini, peneliti ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut.

5.4.1 Bagi Akademisi

- 1) Melakukan penelitian lanjutan untuk memperdalam pemahaman tentang hubungan antara kualitas aparatur daerah, pemanfaatan teknologi informasi, penerapan *good governance*, sistem pengendalian intern, dan kualitas LKPD. Penelitian lanjutan dapat melibatkan metode atau pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan wawasan yang lebih komprehensif.
- 2) Mengeksplorasi faktor-faktor lain yang mungkin memengaruhi kualitas LKPD di tingkat lokal, seperti budaya organisasi, kebijakan publik, atau faktor eksternal lainnya.

5.4.2 Bagi Instansi Pemerintah

- 1) Disarankan untuk meningkatkan jumlah lulusan akuntansi yang direkrut untuk bagian akuntansi/ keuangan, serta terus mengembangkan kualitas aparatur daerah melalui pelatihan dan pengembangan keterampilan yang sesuai dengan tuntutan akuntabilitas dan transparansi dalam penyusunan laporan keuangan.
- 2) Mempertimbangkan kembali pentingnya pemanfaatan teknologi informasi yang efektif dalam menyusun laporan keuangan, termasuk

investasi dalam infrastruktur teknologi yang memadai dan pelatihan bagi pegawai.

- 3) Memperkuat penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam setiap aspek pengelolaan keuangan, termasuk kebijakan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel.
- 4) Perlu ditingkatkan kesadaran akan religiusitas agar aparaturnya daerah tidak hanya mempertimbangkan tanggung jawab terhadap atasan, tetapi juga kepada Tuhan.
- 5) Mengidentifikasi area-area di mana perbaikan atau peningkatan diperlukan untuk meningkatkan kualitas LKPD. Hal ini meliputi perbaikan proses pengelolaan keuangan secara keseluruhan atau lainnya.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap implementasi penerapan *good governance* dan sistem pengendalian intern di lingkungan organisasi untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip *good governance* dan pengendalian intern yang efektif telah diterapkan secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- AgustiningTyas, V. E., Tyasari, I., & Yogivaria, D. W. (2020). Pengaruh *Good governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Lkpd) Pada Opd Kota Malang. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 8(1), 1–14. <https://doi.org/10.21067/jrma.v8i1.4458>
- Apriansyah, H., Rahayu, S., & Erwati, M. (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bungo. *Journal Accounting Review (JAR)*, 1(1), 44–62.
- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6(1), 95–136. <https://doi.org/10.52859/jba.v6i1.44>
- Ardiyanti, R. (2019). Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Pada Desa Woro Kecamatan Kragan Kabupaten Rembang. In *Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang*.
- Aryani, M. D. S. (2021). *PARTISIPASI MASYARAKAT, KOMPETENSI, DAN PERAN PERANGKAT DESA TERHADAP AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN WONOSARI, GUNUNG KIDUL*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Ayuningtyas, I., Sulistyawati, I., & Nugroho, D. (2022). Menakar Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Melalui Faktor-Faktor Penentunya (Studi Empiris pada SKPD di Kota Semarang). *Jurnal JAEMB*, 2(1), 45–55.
- Aziyah, W., & Yanto, H. (2022). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Kompetensi Sumber Daya Manusia sebagai Variabel Moderating. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(1), 977–989. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.686>
- Binawati, E., & Nindyaningsih, C. T. (2022). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 19, 19–39.
- BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah. (2023). *Silpa 2022 Pemkot Semarang*

Capai Rp 318 , 93 Miliar , Ini Penyebab Jumlahnya Besar.
<https://jateng.tribunnews.com/2023/07/10/silpa-2022-pemkot-semarang-capai-rp-31893-miliar-ini-penyebab-jumlahnya-besar>

- Fathia, N., Tanjung, A. R., & Indrawati, N. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN KOMITMEN ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING (Studi Kasus Organisasi Pemerintah Da. *Pekbis Jurnal*, 12(1), 39–54.
- Fauziyah, E. M. (2019). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, KOMPETENSI APARATUR PEMERINTAH DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Pada Organisasi Perangkat Daerah di K. *Jurnal Riset Akuntansi Tirtayasa*, 4(2), 196–209. <https://doi.org/10.48181/jratirtayasa.v4i2.6386>
- Gustina, I. (2021). PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 56–64.
- Hahury, J. F. (2020). Implementasi Fungsi Sekretaris Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. *FOKUS : Publikasi Ilmiah Untuk Mahasiswa, Staf Pengajar Dan Alumni Universitas Kapuas Sintang.*, 18(2), 1–100. <https://doi.org/10.51826/fokus.v18i2.425>
- Hidayat, D., Sari, M., & AR, F. (2021). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH DAN KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Jurnal Valuta*, 7(1), 1–13.
- Indriyani, K. D., & Widiastuti, H. (2020). PENGARUH PENERAPAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA SEBAGAI VARIABEL MODERASI (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat. *Reviu Akuntansi Dan Bisnis Indonesia*.
- Jesa, B. I., & Fahmi, M. I. (2020). MENCAPAI EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBERDAYAAN MELALUI TECHNOLOGY OF PARTICIPATION (ToP): STUDI KASUS DI DESA CISAMBENG KABUPATEN MAJALENGKA. *Journal of Appropriate Technology for Community Services*, 1(2), 82–90. <https://doi.org/10.20885/jattec.vol1.iss2.art4>
- Khairiyah, U. H. (2021). *PENGARUH KOMITMEN ORGANISASI, SISTEM*

PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH, KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA, PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH, PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KA. Universitas Islam Indonesia.

- Kurniasari, A. (2018). *Pengaruh Komitmen Organisasi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Penerapan Good governance dan Dampaknya Pada Kualitas Laporan Keuangan (Studi Empiris pada Dinas Kabupaten Bantul).* Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nurhidayah, & B, I. (2020). Analisis Kualitatif Hubungan Budaya Kerja Organisasi dengan Opini Audit. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 4(2), 505. <https://doi.org/10.33395/owner.v4i2.303>
- Pratiwi, V. P., & Astuti, W. A. (2018). *PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KUALITAS APARATUR TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH (Survey Pada Inspektorat Provinsi Jawa Barat).* 1–8.
- Pravasanti, Y. A., & Ningsih, S. (2019). Pengaruh Kualitas Aparatur Daerah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sukoharjo). *AKTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, 2(2), 199. <https://doi.org/10.21043/aktsar.v2i2.6054>
- Purba, S., & Purba, R. (2023). Determinasi Dalam Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 10(1), 137–152. <https://doi.org/10.25105/jat.v10i1.15264>
- Purnama, A. K. (2020). *PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, DAN PERTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA TERHADAP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA BUKIT SARI KECAMATAN JUJUHAN ILIR KABUPATEN BUNGO.* SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA.
- Rachmawati, D. D., & Anik, S. (2020). “Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah, Good governance Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan” (Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang). *Prosiding Konferensi Ilmiah Mahasiswa Unissula (KIMU) Klaster Ekonomi*, 1389–1407. [lppm-unissula.com](http://ppm-unissula.com)
- Rahmadani, P. D., & Zulaika, N. (2023). PENGARUH PENERAPAN SAP, KOMPETENSI SDM, DAN GOOD GOVERNANCE TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(1), 163–170.
- Rahman, Y., Rachmawati, R., & Fauziannor. (2023). PENGARUH GOOD GOVERNANCE, SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN

KEUANGAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. BADARUDIN KASIM TANJUNG KABUPATEN TABALONG. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Bisnis*, 248–262. <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>

- Ramadhani, E. R., Nirwana, & Usman, A. (2023). The Influence Of Internal Control Systems And Accountability On The Quality Of Local Government Financial Reports With Organizational Culture As Moderator Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 4(3), 3420–3432. <http://journal.yrpiiku.com/index.php/msej>
- Riyanto, M., & Kovalenko, V. (2023). Partisipasi Masyarakat Menuju Negara Kesejahteraan: Memahami Pentingnya Peran Aktif Masyarakat Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Bersama. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5(2), 374–388. <https://doi.org/10.14710/jphi.v5i2.374-388>
- Saputra, N. C. (2021). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Intervening Pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. *Cash*, 4(02), 82–96. <https://doi.org/10.52624/cash.v4i02.1783>
- Sari, F. M. (2022a). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH, *GOOD GOVERNANCE* DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten Batang). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 3(1). <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6648>
- Sari, F. M. (2022b). PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KUALITAS APARATUR PEMERINTAH DAERAH, *GOOD GOVERNANCE* DAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DAERAH (Studi Empiris pada Kabupaten Batang). *JAKA (Jurnal Akuntansi, Keuangan, Dan Auditing)*, 3(1), 27–42. <https://doi.org/10.56696/jaka.v3i1.6648>
- Sintia, D., Maria, M., & Armaini, R. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi Aparatur Pemerintah, dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten OKI. *JAF- Journal of Accounting and Finance*, 6(2), 107. <https://doi.org/10.25124/jaf.v6i2.5198>
- Sinulingga, P. S. B., Simanjuntak, A., & Ginting, M. C. (2022). Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Karo). *Jurnal Manajemen*, 8(1), 89–106. <http://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jm/article/view/158>
- Soimah, S. (2014). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan

Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. In *Jurnal Ekonomi* (Vol. 23, Issue 3). Universitas Bengkulu.

Syahni, N., & Rizki, M. (2023). Evaluasi Kinerja Anggaran Berdasarkan Aspek Implementasi Pada Pusbindklat LIPI Tahun 2019. *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship*, 5(1), 15–26.

Tendean, J. L., Manossoh, H., Walandouw, S. K., Akuntansi, J., Ekonomi, F., Ratulangi, U. S., Bahu, K., Malalayang, K., Manado, K., & Utara, S. (2023). *Evaluasi Kinerja Pegawai Keuangan Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Evaluation of the Performance of Financial Employees at the Regional Industry and Trade Service of North Sulawesi Province*. 07(04), 9–11.

Yulita, S. (2021). *Pengaruh Penerapan Good governance, Standar Akuntansi Pemerintahan (Sap), Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pemerintah Daerah Kabupaten Magelan*. Universitas Tidar.

